2023

EVALUASI
KINERJA TW II
TAHUN 2023

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
KAB. LUWU TIMUR

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat-Nya, kami masih diberikan kemampuan untuk melaksanakan salah satu tugas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sekaligus Penyusunan Laporan Evaluasi Triwulan II Tahun 2023 dapat diselesaikan.

Penyusunan Laporan Evaluasi Triwulan II Tahun 2023 disusun sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan semua kegiatan yang dibebankan kepada OPD dalam hal ini Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Timur, yang juga berperan sabagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong good governance serta berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

Dalam Upaya Pengendalian Penduduk dan Pencapaian Keluarga Berencana yang optimal Penyusunan Laporan Evaluasi Triwulan II Tahun 2023 ini merupakan kegiatan yang juga merupakan evaluasi gambaran kegiatan serta realisasi penggunaan anggaran sesuai dengan rencana kas pada Triwulan II Tahun 2023. Pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan partisipasinya dengan harapan pelaksanaan nanti senantiasa diberikan kelancaran dan dapat diwujudkan serta memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pada akhirnya kami berharap agar Penyusunan Laporan Evaluasi Triwulan II Tahun 2023 ini dapat bermanfaat dan dijadikan panduan serta acuan bagi pegawai Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Timur dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta peranannya masing-masing dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Akhir kata kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut berkontribusi dalam Penyusunan Laporan Evaluasi Triwulan II Tahun 2023 ini

Malili, Juli 2023
Kepala DPPKB Luwu Timur

Dra. Hj. Puspawati
Pangkat. Pembina Tk. I
NIP. 19670308 199402 2 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ---------- i

DAFTAR ISI ---------- iii

BAB I. PENDAHULUAN 1 ----------

a. Gambaran Umum Organisasi ---------- 1
b. Struktur Organisasi ---------- 3
c. Permasalahan Utama (strategic issued) ---------- **4**

BAB II. PERENCANAAN KINERJA ---------- **6**

a. Rencana Strategis SKPD ---------- 6
1. Visi dan Misi ---------- 6
2. Tujuan dan sasaran strategis ---------- 8
b. Indikator Kinerja Utama (IKU) ----------11
c. Perjanjian Kinerja ----------12

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA ----------16

A. Capaian Kinerja Organisasi ----------16
B. Capaian Pelaksanaan Program & Kegiatan----------20
C. Realisasi Anggaran ----------27

BAB IV. PENUTUP 11

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB 1 PENDAHULUAN

Peningkatan akuntabilitas publik para penyelenggara negara khususnya eksekutif pemerintahan, pada dasarnya merupakan prasyarat mendsar bagi terwujudnya pemerintahan yang baik, yang bersih dan yang bebas dari praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sistem dan mekanisme yang dapat diterapkan dalam rangka mewujudkan yang baik adalah sistem akuntabilitas instansi pemerintah. Sistem ini merupakan Langkah-langkah reformasi yang telah diterapkan untuk peningkatan akuntabilitas public dalam penyelenggaraan negara. Sebagai dukungan penyelenggaraan sistem pemerintahan yang baik (good governance) dengan menjadikan akuntabilitas publik sebagai landasan maka diperlukan penyusunan laporan monitoring dan evaluasi triwulan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Timur. Laporan ini merupakan media pertanggungjawaban yang berisi informasi mengenai kinerja instansi pemerintah dan bermanfaat untuk mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan membangun secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundang- undangan yang berlaku. Dalam proses penyusunan perencanaan tersebut perlu melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan agar pemanfaatannya dan pengalokasian sumber daya yang ada dapat secara optimal meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Bidang dan Kewenangan

Bidang dan kewenangan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalah sebagai berikut :

1) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah unsur pelaksana pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan daerah;
2) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

3. Tugas Pokok dan Fungsi

3.1 Tugas Pokok

Tugas pokok Dinas Pegendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah membantu Bupati dalam memimpin dan melaksanakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan.

3.2 Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
d. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan;
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

4. Struktur Organisasi

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur menindaklanjuti dengan terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 64 Tehun 2021 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdapat Lembaga teknis yang menangani khusus untuk Bidang Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk dengan rincian sebagai berikut :

a) Kepala Dinas
b) Sekretariat terdiri atas :
   1. Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian;
   2. Sub Bagian Umum dan Keuangan.

c) Bidang Keluarga Berencana dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, dengan Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional
d) Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, dengan Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional
e) Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, dengan Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional
f) Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 1.1
Bagan Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Timur

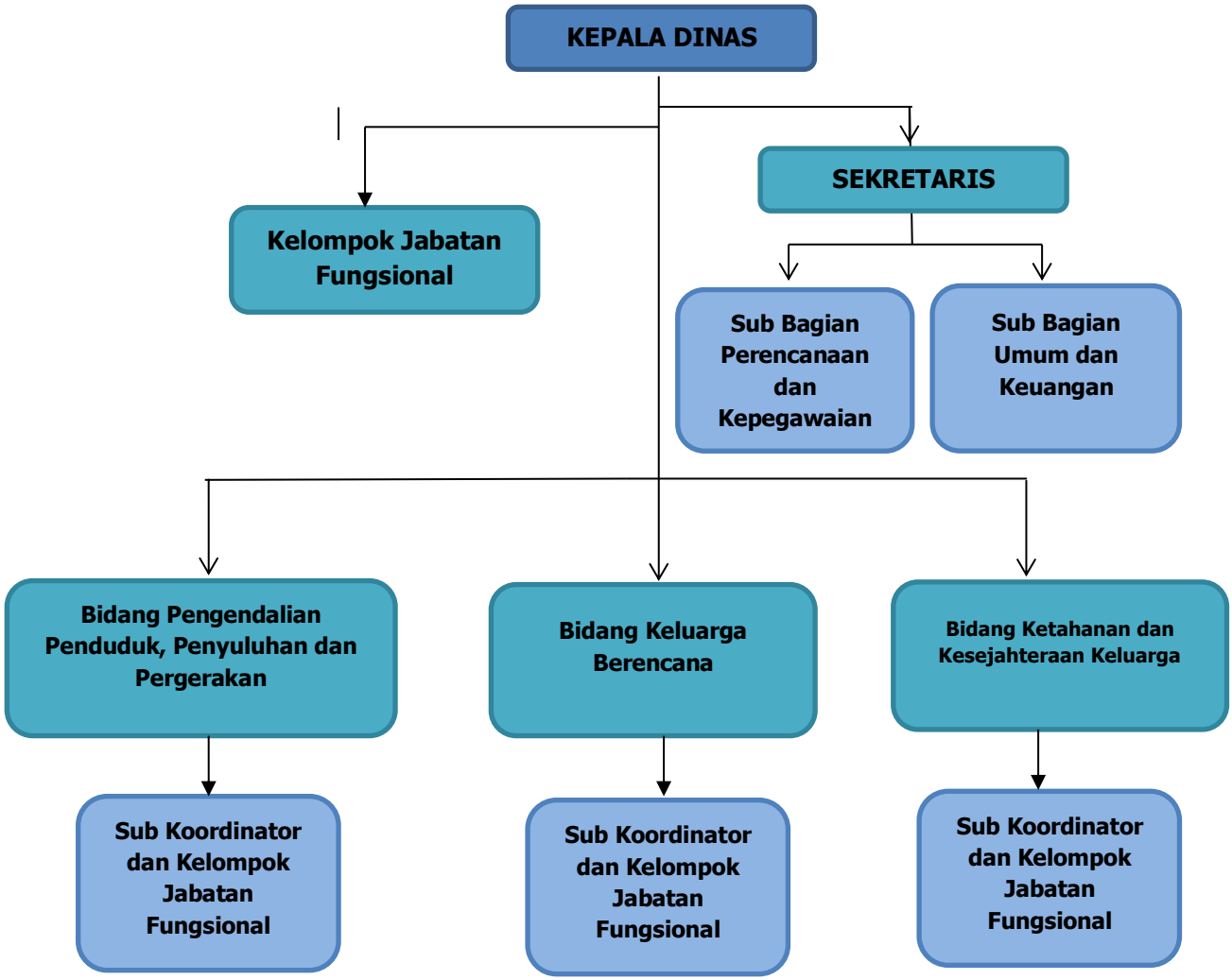

BAB 2 PERENCANAAN KINERJA

1. VISI DAN MISI

1.1 Visi

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar berkonsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi tidak lain adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah. Dengan mengacu pada batasan tersebut, visi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Timur mendukung Visi Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur Periode 2021 – 2026 yaitu :

"Kabupaten Luwu Timur yang Berkelanjutan dan Lebih Maju Berlandas Nilai Agama dan Budaya"

1.2 Misi

Misi merupakan kegiatan yang harus dilaksanakan agar apa yang telah ditetapkan dapat diwujudkan. Misi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Timur dalam mewujudkan visi mencapai 2 (dua) tujuan dalam waktu 5 (lima) tahun adalah meningkatkan penduduk yang berkualitas dan meningkatkan penyelenggaraan layanan urusan perangkat daerah. Hal ini sejalan dengan misi yang yang ingin dicapai Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur Periode 2021-2026 yang mengacu pada :

Misi 1	• Meningkatkan Kesejahteraan dan Taraf Hidup Masyarakat Secara Menyeluruh
Misi 4	• Menciptakan kepemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik

2. TUJUAN, SASARAN DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

2.1 Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran/implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu tertentu. Sebagai penjabaran dari misi, tujuan harus dapat mewujudkan sesuatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang yang dapat bersifat kualitatif ataupun kuantatif dan diupayakan terfokus pada kostumer. Tujuan memiliki 3 karekteristik yaitu idealistik, jangkauan ke depan dan abstrak. Berdasarkan hal tersebut Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Timur menetapkan tujuannya sebagai berikut :

Tabel 2.1

Tujuan RENSTRA Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2021 – 2026

VISI	
Luwu Timur yang Berkelanjutan dan Lebih Maju Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya	
MISI	
1. Meningkatkan Kesejahteraan dan Taraf Hidup Masyarakat Secara Menyeluruh (M1)	2. Menciptakan Kepemerintahan dan Pelayanan Publik yang Lebih Baik (M4)
TUJUAN	
Mewujudkan peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat (T1)	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani (T4)
INDIKATOR TUJUAN	
1. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP); 2. Total Fertility Rate (TFR); 3. Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	1. NIlai SAKIP Perangkat Daerah

2.2 Sasaran

Tujuan tersebut diatas diharapkan dapat mencapai beberapa sasaran organiasi. Sasaran organisasi ditetapkan dengan menggunakan ukuran kuantitatif sehingga pencapaian dapat diukur dengan jelas. Sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui Tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat, terinci, dapat diukur dan dicapai. Berdasarkan hal tersebut Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Timur menetapkan sasaran sebagai berikut :

Tabel 2.2

Sasaran Jangka Menengah Pelayanan OPD

INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR SASARAN	SAT	TARGET					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
TUJUAN 1: Meningkatkan Penduduk yang Berkualitas								
SASARAN 1: Menurunnya Angka Kelahiran								
Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)		%	1.88	1.79	1.7	1.63	1.57	1.57
	Total Fertility Rate (TFR)	Rata Anak per Wanita	2.66	2.6	2.53	2.47	2.4	2.4
SASARAN 2 : Meningkatkan Kualitas Pembangunan Keluarga								
	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks	35.05	35.52	36.02	36.22	36.32	36.33
TUJUAN 2: Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Layanan Urusan Perangkat Daerah								
SASARAN : Meningkatkan Kualitas dan Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perangkat Daerah								
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	65	70	75	80	80	80
	Persentase Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100	100

2.3 Indikator Kinerja Utama

Penetapan Indikator Kinerja Utama didasarkan pada Peraturan Menteri NegaraPendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Pada tabel berikut ini dapat dilihat matriks hubungan antara tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama. Dimana setiap tujuan memiliki indikator sebagai alat ukur terhadap capaian kinerja yang dilakukan

Tabel 2

Indikator Kinerja Utama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No.	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Formulasi	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Menurunnya Angka Kelahiran	Total Fertility Rate (TFR)	Nilai	$TFR = 5 \sum_{i=15-19}^{45-49} ASFR_i$ ASFRi : ASFR untuk wanita pada kelompo usia ke-i i = kelompok usia 15-19, 20-24, ..., 45-49 **Keterangan :** TFR = Total Fertility Rate JK 15-49 : Banyaknya Kelahiran dari perempuan umur 15-49 tahun selama periode tertentu. JK 15-49 : Banyaknya Kelahiran dari perempuan umur 15-49 tahun selama periode tertentu.	Laporan Statistik Rutin Dinas P2KB Kab. Luwu Timur	Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan Bidang Keluarga Berencana.

No.	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Formulasi	Sumber Data	Penanggung Jawab
2	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Nilai	**iBangga = 1/3 (indeks ketentraman + Indeks kemandirian + indeks kebahagiaan) x 100** Dimana :	Laporan Statistik Rutin Dinas P2KB Kab. Luwu Timur	Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
				Nilai Komposit dari 3 dimensi dengan mempertimbangkan bobot tertentu, yaitu **(a) Dimensi Ketentraman dengan indikator antara lain (1) kegiatan ibadah; (2) legalitas keluarga; (3) jaminan kesehatan; (4) jaminan keuangan; (5) keharmonisan keluarga;**		

No.	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Formulasi	Sumber Data	Penanggung Jawab
				(b) Dimensi Kemandirian dengan indikator antara lain (1) pemenuhan kebutuhan dasar; (2) keberlangsungan pendidikan; (3) kesehatan keluarga; (4) akses informasi; **(c) Dimensi Kebahagiaan dengan indikator antara lain (1) Interaksi Keluarga; (2) Interaksi sosial;**		
3	Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah	Persentase Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah	%	$\frac{\text{Jumlah total Kegiatan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah kabupaten/kota}}{\text{Jumlah kegiatan-kegiatan program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota}} \times 100\%$	Laporan Realisasi Kasubag Umum dan Keuangan dan Kasubag Perencanaan dan Kepegawaian	SEKRETARIAT

2.4 RENCANA KINERJA OPD

Untuk mempercepat implementasi pencapaian visi dan misi pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Timur dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah, diperlukan rencana kinerja yang meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif sehingga dinamika pembangunan tetap terarah menuju visi dan misi yang diharapkan.

2.5 Perencanaan Kinerja

Pada tahun 2023 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Timur telah menetapkan perencanaan kinerja. Perencanaan kinerja ini ditetapkan menjadi perjanjian kinerja yang merupakan perwujudan komitmen antara Bupati selaku pemberi amanah kepada Kepala OPD selaku penerima amanah. Dalam setiap perjanjian kinerja yang dibuat, telah ditetapkan indikator yang terukur. Salah satu tujuan dari perjanjian kinerja ini adalah sebagai tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja OPD.

Adapun perjanjian kinerja tahun 2023 yang dibuat Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Timur, yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.3

Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Timur (Eselon II)

No.	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
1.	Menurunnya Angka Kelahiran	Total Fertility Rate (TFR) (Rata-rata Anak per Wanita)	2.53
2.	Meningkatnya Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks Pembangunan Keluarga (Indeks)	36.02
3.	Meningkatnya kualitas dan pencaipan kinerja penyelenggaraan urusan Perangkat Daerah	Persentase capaian nya kinerja program Perangkat Daerah (%)	100%

1. Total Fertility Rate(TFR) : Rata-rata banyaknya anak yang dilahirkan hidup oleh seorang wanita sampai akhir masa reproduksinya (asumsi, wanita tersebut tetap hidup sampai akhir masa reproduksi dan mengikuti pola

fertilitas tertentu). Angka ini diperoleh dengan menjumlahkan angka fertilitas menurut umur,

Penentuan Target tahun per tahun berdasarkan surat dari BKKBN Perwakilan Sulawesis Selatan Nomor: 1120/PD.03/J.2/2021,tgl 27 Juli 2021 Perihal: Perhitungan Indikator Program Bangga Kencana

2. Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga): menjelaskan kualitas keluarga yang ditunjukkan melalui ketenteraman, kemandirian, dan kebahagiaan keluarga. IBangga memberikan gambaran peran dan fungsi keluarga di Indonesia untuk mewujudkan kualitas keluarga

   Penentuan target iBangga ditentukan berdasarkan diatas target renstra DP3A Provinsi Sulawesi selatan

2.6 Rencana Anggaran Tahun 2023

Dalam pelaksanaan IKU (Indikator Kinerja Utama) DPPKB, rencana strategis sertaprogram dan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun anggaran 2023 harus didukung dengan Anggaran APBD Kabupaten Luwu Timur untuk belanja sebesar **Rp 10.591.563.425,-** (Sepuluh Milyar Lima ratus Sembilan Puluh Satu Juta Lima ratus Enam Puluh Tiga Empat ratus Dua Puluh Lima Rupiah) yang bersumber dari Dana DAK fisik sebesar Rp. 927.185.000 dan Non Fisik sebesar Rp. 4.445.746.000 BOKB dan PAD sebesar Rp. 5.218.632.425,-

Adapun anggaran tersebut dirinci berdasarkan program, secara lengkap anggaran tersebut disajikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 4

Pagu Anggaran Tahun 2023

No	Program	Pagu Anggaran	keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Rp. 3.064.238.275,-	PAD dan DAU
2	Program Pengendalian Penduduk	Rp. 389.353.050,-	PAD dan DAK
3	Program Pembinaan dan Keluarga Berencana	Rp. 4.929.143.100 ,-	PAD dan DAK
4	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Rp. 2.208.829.000 ,-	PAD dan DAK

BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban dari suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakannya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pelaporan berupa laporan akuntabilitas kinerja secara periodik. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Selain capaian setiap sasaran, laporan ini juga menyajikan analisis efisiensi dan efektifitas yang merupakan perbandingan capaian kinerja input terhadap output kegiatan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Timur selaku pengemban amanah masyarakat di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian laporan. Laporan akuntabilitas kinerja yang dibuat sesuai ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Intansi Pemerintah.

A. Analisis Capaian Kinerja

Analisis capaian kinerja dilakukan terhadap capaian sasaran strategis dan sasaran program. Dalam menyimpulkan keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian tiga sasaran strategis dilakukan dengan mengukur dan menganalisa capaian indikator *outcome*. Analisis capaian sasaran program juga dilakukan sebagai pendukung capaian kinerja sasaran strategis yang dilakukan terhadap indikator kinerja utama. Analisis juga dilakukan terhadap indikator kinerja yang tidak secara langsung mendukung capaian kinerja, namun berpengaruh terhadap perwujudan sasaran program. Analisis efisiensi penggunaan input berupa sumber daya keuangan dan manusia dilakukan terhadap tiap indikator kinerja dengan cara membandingkan capaian indikator kinerja dengan capaian penggunaan sumber daya. Efisiensi

sumber daya terjadi manakala capaian indikator kinerja lebih tinggi dari pada capaian penggunaan sumber daya. Analisis efisiensi dilakukan secara terpisah antara sumber daya keuangan dan sumber daya manusia

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALIASI	%
1	Menurunnya Angka Kelahiran	Total Fertility Rate (TFR	2,53		
2	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	36,02		
3	Meningkanya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah	Persentase capaian kinerja program perangkat daerah	100		

Hasil pengukuran kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Timur sebagaimana dimaksud dalam Penetapan Kinerja Tahun 2023 diuraikan sasaran per sasaran strategis berikut indikator kinerjanya masing-masing. Penjabarannya adalah sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1 :

"Menurunnya Angka Kelahiran"

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2023

Tabel. 6

Target dan Realisasi Kinerja Sasaran ke -1

Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi				Capaian
		TW I	TW II	TW III	TW IV	
Total Fertility Rate (TFR)	2.53					
Persentase Capaian Rata-rata						

Sumber: BPS

Untuk menghitung TFR dengan rumus sebagai berikut:

$$TFR = 5 \sum_{i=15-19}^{45-49} ASFR_i$$

ASFRi : ASFR untuk wanita pada kelompo usia ke-i

i = kelompok usia 15-19, 20-24, ..., 45-49

Keterangan :

TFR = Total Fertility Rate

JK 15-49 : Banyaknya Kelahiran dari perempuan umur 15-49 tahun selama periode tertentu.

JK 15-49 : Banyaknya Kelahiran dari perempuan umur 15-49 tahun selama periode tertentu.

Indikator Angka Kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR) adalah indikator yang capaiannya semakin rendah (menurun) maka dinyatakan semakin baik. Sehingga rumus yang digunakan untuk menghitung capaian indikator tersebut adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Rencana-(Realisasi-Rencana) x 100}}{\text{Rencana}}$$

Pada indikator sasaran angka kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR), dari target tahun 2023 yang telah ditetapkan 2,6 belum dapat dihitung realisasinya dikarenakan perhitungan Angka Kelahiran Total/Total Fretility Rate (TFR) hanya dapat dilakukan pada akhir tahun. Hal ini disebabkan karena dalam menentukan TFR harus melihat jumlah penduduk dan kondisi akhir tahun yang harus dibandingkan dengan jumlah penduduk dengan tahun sebelumnya dan menunggu hasil dari BPS.

Untuk meningkatkan kinerja ditahun 2023, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana akan lebih meningkatkan koordinasi dengan Lintas Sektor serta konseling informasi dan edukasi pelayanan KB.

- ❖ Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran Total Fertility Rate (TFR) yaitu :
  - Program Pengendalian Penduduk

1. Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah KabupatenKota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
2. Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten Kota
   - Program Pembinaan Keluarga Berencana
     1. Pelaksanaan Advokasi Komunikasi Informasi dan Edukasi KIE Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal
     2. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KBPetugas Lapangan KB PKBPLKB
     3. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah KabupatenKota
     4. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah KabupatenKota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan BerKB

- ❖ **Hambatan/Kendala**

  Dalam pencapaian indikator Total Fertility Rate (TFR), terdapat beberapa hambatan atau kendala yang dihadapi yaitu :

  1. Masih tingginya angka drop out, sehingga mempengaruhi tingginya angka unmetneed (KB tidak terlayani)
  2. Masih tingginya angka kelahiran Menurut Umut (ASFR 15-19)

3. Masih rendahnya angka kesertaan ber-KB, dimana masih banyak Masyarakat yang enggan melakukan KB dengan berbagai alas an. Diantaranya factor Kesehatan (medis), budaya dan kepercayaan, serta masih adanya stigma dimasyarakat bahwa peserta KB hanyalah Perempuan.
4. Masih tingginya angka pernikahan usia dini (<20 tahun)

❖ **Solusi**

Untuk menjawab permasalahan atau kendala yang dihadapi, maka telah dilakukan beberapa solusi yaitu:

1. Perlunya peningkatan pembinaan administrasi pencatatan dan pelaporan secara berkesinambungan, sekaligus diikuti monitoring dan evaluasi secara periodic
2. Perlunya peningkatan kapasitas pembinaan dan pelayanan kepesertaan ber KB untuk diarahkan menjadi peserta KB MKJP, yang dilaksanakan secara rutin dan berkesinambungan, khususnya bagi peserta KB non MKJP. Hal ini disebabkan bahawa metode KB Non MKJP sangat rawan terjadi kegagalan (kehamilan), yang berakibat meningkatnya angka Drop out (putus menjadi peserta KB).
3. Peningkatan pembinaan pendewasaan usia perkawinan bagi remaja
4. Peningkatan partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Program Bangga kencana yang dilaksanakan melalui pembinaan secara rutin dan berkesinambungan
5. Peningkatan pembinaan ketahanan keluarga dan pemberdayaan ekonomi keluarga.

Upaya -upaya penting yang dilakukan dalam tahun 2023 untuk mendukung pencapaian kinerja tersebut diatas antara lain:

a. Koordinasi dan Kerjasama dengan lintas sektor
b. Peningkatan Pelayanan KB
c. Adanya dukungan Operasional pelaksanaan bangga kencana ditingkat lini lapangan.
d. Meningkatkan Komunikasi,Informasi dan Edukasi

❖ **Analisis Efisiensi Sumber Daya**

Tabel. 8
Pencapaian Kinerja dan Anggaran sampai dengan Triwulan II tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Menurunnya Angka Kelahiran	Total Fertility Rate (TFR)	2,53			5.318.496.150	1.071.895.050	20,15%
Program Pengendalian Penduduk	Rata rata jumlah anak per keluarga	2			389.353.050	97.607.195	64,27%
Program Pembinaan Keluarga berencana	Angka Kelahiran Remaja (Perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19) (%)	26,76 %			4.929.143.100	974.287.855	49,67%
	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (%)	39,14 %					
	Persentase Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) (%)	12,4%					
	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalensi Rate/mCPR) (%)	58,9%					

Tabel. 9

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	% Tingkat Efisiensi Biaya
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Menurunnya Angka Kelahiran	Total Fertility Rate (TFR)		20,15%	

Pencapaian sasaran strategis Menurunnya Angka Kelahiran belum dapat dihitung realisasinya dikarenakan perhitungan Angka Kelahiran Total/Total Fretility Rate (TFR) hanya dapat dilakukan pada akhir tahun. Hal ini disebabkan karena dalam menentukan TFR harus melihat jumlah penduduk dan kondisi akhir tahun yang harus dibandingkan dengan jumlah penduduk dengan tahun sebelumnya dan menunggu hasil dari BPS.

. Adapun Persentase efisiensi biaya dapat hitung dengan menggunakan rumus :

$$\text{Persentase efiesinesi biaya} = 100\% - \left[\frac{\text{Realisasi Biaya}}{\text{Target Biaya}} \times 100\% \right]$$

2. Perbandingan antara target dan realisasi dengan tahun sebelumnya

Tabel. 10
Perbandingan Target dan Realisasi dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Sasaran I :						**Menurunnya Angka kelahiran**				
Indikator Kinerja Sasaran	**Tahun 2021**			**Tahun 2022**			**Tahun 2023**			Target Tahun 2026
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Total Fertility Rate (TFR)	2.66 %	2,79	100 %	2,6	2,79	100 %	2,53			2,4%

Tabel. 3.3

Perbandingan Capaian Sasaran Menurunnya Angka Kelahiran

Perbandingan realisasi pencapaian pada tahun-tahun sebelumnya mulai tahun 2021-2022 tidak mengalami kenaikan hal ini dapat kita lihat pada tabel. Namun Pada tahun 2021 Total Fertility Rate (TFR) sekitar 2,79 dan Pada tahun 2022 pencapaiannya sebesar 2,79, TFR ditentukan oleh Batasan target tahun 2023 ada pada angka 2,53 realisasi 2,79 % sehingga indikator ini dikatakan belum mencapai target karena Total Fertility Rate (TFR) realisasi 2,79% angka ini diatas dari batas target yang ditentukan. Dapat digambarkan dalam diagram sebagai berikut :

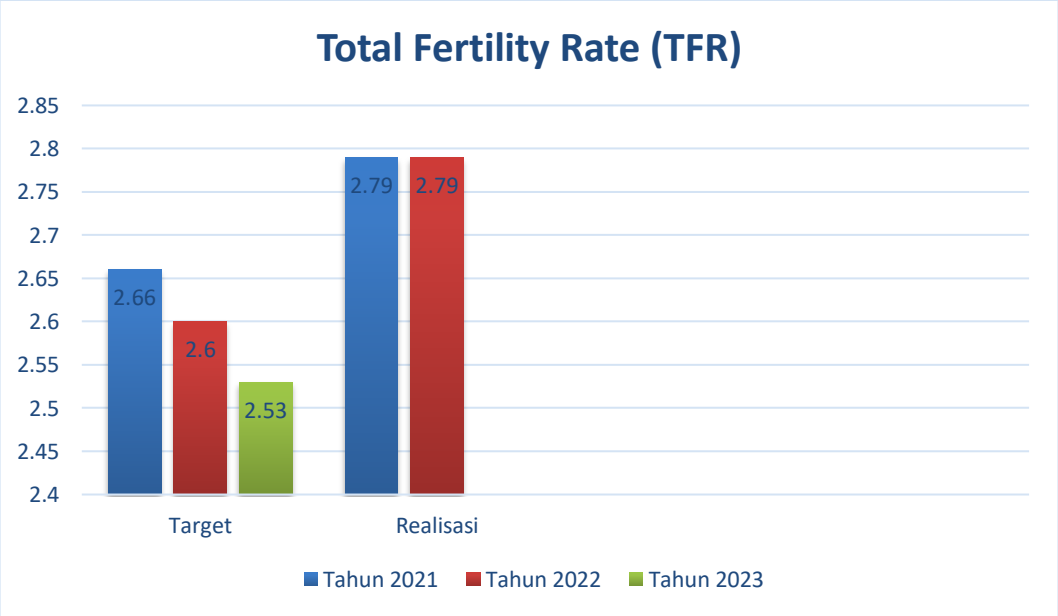

❖ **Program Keluarga Berencana**

Target program tahun 2021, 2022 dan 2023 dapat digambarkan dengan tabel sebagai berikut :

Target dan Realisasi Kinerja Tahun Lalu dan Tahun Terakhir

No	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan / subkegiatan (Output)	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
			2021		2022		2023	
I	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Angka Kelahiran Remaja (Perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19) (persen)	15,61%	35,41%	28,16%	35,41%		
		Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (persen)	36,64%	37,30%	37,89%	34,24%		
		Persentase Kebutuhan Ber- KB yang tidak terpenuhi (unmeetneed) (persen)	13,46%	18,43%	12,88%	20,45%		
		Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalensi Rate/mCPR) (persen)	57,20%	56,90%	58,00%	66,37%		
1	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase Masyarakat yang terpapar isi pesan program KKBPK (Advokasi dan KIE) (persen)	100	100	100	100	100	
	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai	Jumlah Balai yang mendapat dukungan	12	12	12	12		

No	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan / subkegiatan (Output)	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
			2021		2022		2023	
	Penyuluhan KKBPK	Operasional Pembiayaan (Balai Penyuluhan)						
	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Jumlah Sarana KIE yang disediakan (jenis)	8	8	8	8		
2	**Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Ketersediaan dan Distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat (persen)**	**100**	**100**	**100**	**100**		
	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah akseptor MKJP (akseptor)	11.500	11.635	11.500	9.545		
	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Mendapatkan Distribusi Alokon (Fasilitas Kesehatan)	21	21	21	21	21	
	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah sarana yang tersedia (Unit)	422	422	27	27		

Perbandingan capaian realisasi kinerja tahun lalu dan tahun 2023 ada beberapa yang mengalami penurunan dimana jika capaian dari tahun ke tahun mengalami penurunan maka dikatakan berhasil dapat dilihat pada tabel diatas seperti capaian realisasi **Angka Kelahiran Remaja (Perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19) (persen), Persentase Kebutuhan Ber- KB yang tidak terpenuhi (unmeetneed) (persen),** Namun ada juga indikator ini sifatnya dikatakan berhasil apabila terjadi peningkatan capaian dari tahun sebelumnya yaitu **Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (%),Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalensi Rate/mCPR) (persen)**

3. Perbandingan Capaian Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah

Berdasarkan realisasi tahun 2022 jika dibandingkan dengan target yang direncanakan sampai dengan tahun 2026, sangat memungkinkan dapat dicapai..

Adapun perbandingan antara target dan capaian pada tahun 2023 dengan target jangka menengah pada Renstra DPPKB Kabupaten Luwu Timur 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut Ini :

Tabel. 11

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Jangka Menengah

(2021 – 2026)

Sasaran I :	**Menurunnya Angka Kelahiran**			**Target Akhir Renstra 2026**	**% Capaian s/d 2022 terhadap target akhir Renstra 2026**
Indikator Kinerja Sasaran	**Realisasi**				
	Tahun 2021	Tahun 2022	rata-rata realisasi sampai dengan tahun 2022		
Total Fertility Rate (TFR)	2,79	2,79	2,79	2,4 %	2,4%

4. Perbandingan Capaian Kinerja DPPKB Kab.Luwu Timur Tahun 2023 dengan capaian BKKBN Provinsi dan capaian BKKBN Nasional menurut PK 2022

Tabel 3.4

Perbandingan Capaian Kinerja DPPKB Kab. Luwu Timur Tahun 2023 dengan target BKKBN Provinsi dan target BKKBN Nasional Menurut PK 2023.

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Capaian Kinerja DPPKB kab.Luwu Timur Tahun 2023		Target Renstra BKKBN Provinsi SulSel 2020-2024	Target Renstra BKKBN Nasional 2020-2024
			Target	Realisasi	2023	2023
1.	Total Fertility Rate (TFR)	%	2,53	2,79	2,29	2,24
2.	Pemakaian kontrasepsi modern (modern contraseptive prevalence rate / mCPR)	%	58,00	66,57	62,54	57,00
3.	Kebutuhan ber KB yg tidak terpenuhi (Unmetneed)	%	12,88	18,1	20,00	18,00
5.	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (*Age Specific Fertility Rate*/**ASFR 15-19)**	%	28,16	43,2	27,4	20,5

Pada tabel 3.3 diatas dari keempat indikator utama DPPKB Kab.Luwu Timur Tahun 2022 yang menarik perhatian adalah capaian angka TFR. Bila dibandingkan dengan capaian Renstra BKKBN Provinsi maupun capaian BKKBN Nasional, angka 16.59% masih jauh dari harapan. Hal ini masih menjadi “PR” utama bagi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab.Luwu Timur, bagaimana strategi dan upaya untuk menurunkan angka TFR tersebut.

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatam/penurunan kinerja serta alternativ solusi yang telah dilakukan

Faktor penentu utama keberhasilan Total Fertility Rate (TFR) adalah dilihat dari :

- usia perkawinan pertama
- program KB
- Tingkat Pendidikan
- status pekerjaan

Faktor Pendukung lainnya :

- Petugas lapangan (PLKB) di Luwu Timur jumlahnya di atas ratio PLKB nasional yakni 100 PLKB sementara jumlah desa yang ada hanya 127 desa.
- Adanya dukungan dari mitra (puskesmas dan RS sebagai penyedia tenaga medis dalam kegiatan pelayanan keluarga berencana)
- Dukungan anggaran yang tidak hanya bersumber dari APBD tetapi juga dari pusat melalui anggaran DAK

6. Analisis Terhadap Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran yang ditetapkan pada APBD-Perubahan sebagai pendukung pencapaian sasaranStrategis I yang terdiri dari 2 Program Ini dengan pagu anggaran sebesar **Rp 5.318.496.150**,- dengan realisasi sampai dengan TW II anggaran sebesar **Rp 1.071.895.050**,- sehingga capaian anggaran yang diperoleh sebesar **20,15%.** Sedangkan realisasi kinerja yang diperoleh adalah sebesar **0%.**

7. Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

1. Program Pengendalian Penduduk

Indikator Kinerja Program Pengendalian Penduduk yaitu Rata rata jumlah anak per keluarga (anak) yang diukur dengan Formula :

Rata-Rata Jumah anak per keluarga = Jumlah Anak x 100%

Jumlah KK

= 87.301 anak x 100%
71.044 KK
= 1,22%

Program ini terdiri dari 2 Kegiatan dan 6 sub kegiatan yaitu:

a. Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah KabupatenKota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk. Adapun Sub Kegiatan yang mendukung capaian kegiatan ini adalah sebagai berikut :
   - ✓ Sub kegiatan Implementasi pendidikan Kependudukan jalur pendidikan formal dan Nonformal
   - ✓ Sub. Kegiatan Sosialisasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan Kepada Pemangku Kepentingan
   - ✓ Sub kegiatan Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK

b. Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten Kota
   - ✓ Penyediaan Data dan Informasi Keluarga
   - ✓ Pengolahan dan pelaporan data pengendalian lapangan dan Pelayanan KB

2. Program Pembinaan Keluarga Berencana

Indikator Kinerja Program Pembinaan Keluarga Berencana yaitu:

- Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalensi Rate/mCPR) ditargetkan 58,90% dan terealisasi 62,86 atau dengan capaian 112,68 % sehingg realisasi dapat dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Jumlah Peserta Aktif}}{\text{Jumlah PUS}} \times 100\%$$

$$= \frac{26.782}{42.606} \times 100 = 62,86$$

Capaian Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalensi Rate/mCPR) dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1

No.	Kecamatan	Jumlah Peserta KB Aktif Modern	Jumlah Pasangan Usia Subur	Prosentase (%)
1	BURAU	3.337	5.047	66,12
2	WOTU	3.203	4.738	67,60
3	TOMONI	2.791	4.415	63,22
4	MANGKUTANA	2.286	3.345	68,34
5	TOMONI TIMUR	1.487	2.135	69,65
6	KALAENA	1.383	2.029	68,16
7	ANGKONA	2.490	3.704	67,22
8	MALILI	3.511	5.971	58,80
9	WASUPONDA	1.294	2.259	57,28
10	TOWUTI	3.379	5.875	57,51
11	NUHA	1.621	3.088	52,49
	JUMLAH	**26.782**	**42.606**	**62,86**

- Angka Kelahiran Remaja (Perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19), capaiannya : 35,41 tidak mengguna formulasi tetapi bersumber dari data SUSENAS 2019

- Persentase Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) ditargetkan 12,40% dan terealisasi 18,42 atau dengan capaian 148,63% sehingga realisasi dapat dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Jumlah PUS yang tidak ber KB}}{\text{Jumlah PUS}} \times 100\%$$

$$= \frac{8.207}{44.529} \times 100 = 18,43$$

Capaian Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalensi Rate/mCPR) dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2

No.	Kecamatan	Jumlah PUS Yang ingin ber KB tetapi tidak terlayani (Unmet Need)	Jumlah Pasangan Usia Subur	Prosentase (%)
1	BURAU	817	5.270	15,50
2	WOTU	822	4.976	16.52
3	TOMONI	879	4.610	19,07
4	MANGKUTANA	557	3.514	15,85
5	TOMONI TIMUR	256	2.266	11,30
6	KALAENA	320	2.117	15,12
7	ANGKONA	532	3.898	13,65
8	MALILI	1.302	6.201	21,00
9	WASUPONDA	590	2.373	24,86
10	TOWUTI	1.394	6.111	22,81
11	NUHA	738	3.193	23,11
	JUMLAH	**8.207**	**44.529**	**18,43**

- Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) ditargetkan 39,14% dan terealisasi 35,64% atau dengan capaian 91,04% sehingga realisasi dapat dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$= \frac{\text{jumlah pengunaan KB jangka panjang}}{\text{jumlah KB aktif}} \times 100$$

$$= \frac{9.544}{26.782} \times 100 = 35,64$$

Capaian Persenyase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2

No.	Kecamatan	Jumlah metode Kontrasepsi Modern				Total	Jumlah Peserta KB Aktif Modern	Prosentase (%)
		IMPLAN	IUD	VASEKTOMI	TUBEKTOMI			
1	BURAU	976	109	0	131	1.216	3.337	36,44
2	WOTU	764	196	0	128	1.088	3.203	33,97
3	TOMONI	563	160	0	107	830	2.791	29,74
4	MANGKUTANA	459	277	2	88	826	2.286	36,13
5	TOMONI TIMUR	423	145	2	60	630	1.487	42,37
6	KALAENA	356	179	0	38	573	1.383	41,43
7	ANGKONA	741	274	13	75	1.103	2.490	44,30
8	MALILI	638	88	4	143	873	3.511	24,86
9	WASUPONDA	362	85	1	98	546	1.294	42,19
10	TOWUTI	704	233	3	269	1.209	3.379	35,78
11	NUHA	192	282	3	173	650	1.621	40,10
	JUMLAH	**6.178**	**2.028**	**28**	**1.310**	**9.544**	**26.782**	**35,64**

Sasaran 2 :

"Meningkatnya Kualitas Pembangunan Keluarga"

1. **Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2023**

Realisasi Indikator kinerja Untuk Sasaran 2 Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian
Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	36,02		
Persentase Capaian Rata-rata			

Untuk mendapatkan angka realisasi digunakan perhitungan sebagai berikut :

iBangga = 1/3 (indeks ketentraman + Indeks kemandirian + indeks kebahagiaan) x 100

Dengan Formulasi perhitungan capaian target indikator 2 sebagai berikut :

$$\text{I bangga} = \frac{\text{Indeks ketentraman + Indeks Kemendarian + Indeks Kebahagian}}{3}$$

$$\text{Ketentraman} = \frac{488.483}{68.888} \times 6 = 57,95$$

$$\text{Kemandirian} = \frac{411.460}{69.268} \times 7 = 41.58$$

$$\text{Kebahagian} = \frac{162.333}{29.502} \times 4 = 22.00$$

$$\text{I bangga} = \frac{57.95 + 52,30 + 48.97}{3}$$

$$= 53,07$$

Dimana:

Nilai Komposit dari 3 dimensi dengan mempertimbangkan bobot tertentu, yaitu

(a) Dimensi Ketentraman dengan indikator antara lain (1) kegiatan ibadah; (2) legalitas keluarga; (3) jaminan kesehatan; (4) jaminan keuangan; (5) keharmonisan keluarga;
(b) Dimensi Kemandirian dengan indikator antara lain (1) pemenuhan kebutuhan dasar; (2) keberlangsungan pendidikan; (3) kesehatan keluarga; (4) akses informasi;
(c) Dimensi Kebahagiaan dengan indikator antara lain (1) Interaksi Keluarga; (2) Interaksi sosial;

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) tahun 2023 capaiannya diatas dari target yang ditetapkan yakni 35,05% realisasi 53,07% persentase capaian rata-rata yaitu 151,41 % berarti capaian diatas target yang ditentukan ini menunjukkan indeks pembangunan keluarga meningkat dari target, namun dilihat dari Indeks (Skala 1-100) angka ini masih masuk dalam kategori (rendah) dan menjadi

tantangan untuk tetap menaikkan realisasi iBangga dengan melaksanakan program untuk mencapai indeks pembangunan keluarga.

Pemberdayaan keluarga di bidang ekonomi bertujuan untuk menumbuhkan dan menciptakan minat, semangat, keterampilan serta kinerja keluarga dalam bidang usaha ekonomi produktif. Melalui upaya ini keluarga khususnya keluarga Pra Sejahtera dan KS I diharapkan mampu memanfaatkan peluang usaha yang ada dalam rangka meningkatkan pendapatan keluarga.

Realisasi yang melebihi target ini harus tetap menjadi perhatian atau dikawal agar angka Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) tetap dapat dipertahankan.

Indeks Pembangunan Keluarga merupakan ukuran program pembangunan keluarga yang ditunjukkan melalui dimensi ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga serta menggambarkan peran dan fungsi keluarga.

Pada dimensi ketentraman terdiri dari 4 indikator, yaitu kegiatan Ibadah, Legalitas keluarga, Jaminan kesehatan dan Keharmonisan keluarga. Adapun variabelnya ada 6 yaitu : (1) Selama 6 bulan terakhir, setiap anggota keluarga (usia 10 tahun ke atas) menjalankan ibadah secara rutin sesuai dengan tuntunan agama atau kepercayaan yang dianut, (2) Keluarga memiliki buku/akta nikah yang disahkan oleh pejabat yang berwenang, (3) Setiap anak (usia 0- 17 tahun) dalam keluarga memiliki akta lahir yang disahkan oleh pejabat yang berwenang, (4) Setiap anggota keluarga memiliki kartu jaminan kesehatan (pemerintah/swasta), (5) Selama 6 bulan terakhir, terdapat konflik : a)Tanpa tegur sapa; b) Pisah ranjang antara suami dan istri; c) Anggota keluarga pergi dari rumah/minggat; d) Kekerasan dalam rumah tangga antar anggota keluarga, (6) Keluarga mengalami cerai hidup.

Kemudian pada Dimensi Kemandirian terdiri dari 5 indikator yaitu Pemenuhan kebutuhan dasar, Keberlangsungan pendidikan, Kesehatan keluarga, Akses informasi, dan Jaminan keuangan. Adapun variabelnya ada 7 terdiri dari: (1) Selama 6 bulan terakhir, terdapat paling sedikit 1 anggota keluarga memiliki sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan pokok per bulan, (2) Selama 6 bulan terakhir, setiap anggota keluarga makan “makanan beragam” (makanan pokok, sayur/buah dan lauk) paling sedikit 2 kali sehari, (3)

Keluarga tinggal dalam rumah layak huni, (4) Keluarga memiliki tabungan/simpanan (uang kontan, perhiasan, hewan ternak, hasil kebun, dll) yang dapat digunakan sewaktu-waktu untuk memenuhi kebutuhan pokok dalam 3 bulan kedepan, (5) Setiap anggota keluarga yang saat ini berusia sekolah (7-18 tahun) tidak ada yang putus sekolah di SD/Sederajat sampai dengan SLTA/sederajat), (6) Selama 1 bulan terakhir, terdapat anggota keluarga yang sakit 4 hari berturut-turut sehingga meninggalkan aktifitas , (7) Keluarga memiliki akses informasi dari media online (internet)

Dimensi Kebahagiaan terdiri dari 2 indikator yaitu Interaksi keluarga dan Interaksi sosial. Adapun variabelnya ada 4 yang terdiri dari : (1) Selama 6 bulan terakhir, setiap anggota keluarga memiliki waktu untuk berinteraksi setiap hari, (2) Selama 6 bulan terakhir, pengasuhan anak dilakukan bersama antara suami dan istri, (3) Selama 6 bulan terakhir, keluarga pernah berekreasi bersama di luar rumah, (4) Selama 6 bulan terakhir, keluarga ikut serta dalam kegiatan sosial / gotong royong di lingkungan RT.

2. Perbandingan antara target dan realisasi dengan tahun sebelumnya

Perbandingan Target dan Realisasi dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023
Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	35.52%	53,07	35,05	53,07	36,02	

Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja pada tahun 2021 sebesar 53,07% dan pada Tahun 2022 sebesar 53,07 % ,sehingga capaian ini tahun 2022 sama dengan capaian tahun 2021.

Dapat digambarkan dalam diagram sebagai berikut :

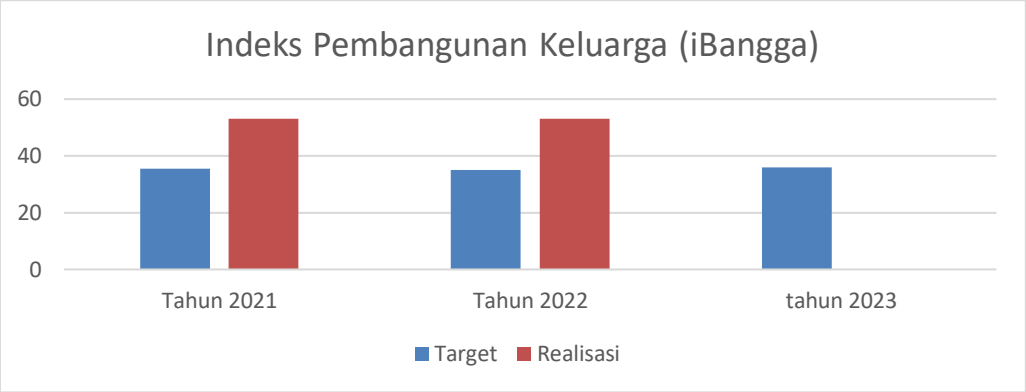

Adapun Program/kegiatan pendukung pada indikator ini yakni:

- Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

  Indikator Kinerja Program Pembinaan Keluarga Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) yaitu Rata-rata usia Kawin Pertama

  Program ini terdiri dari 2 kegiatan dan 7 sub kegiatan yaitu:

  a. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
     - ✓ Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)
     - ✓ Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejateraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga / UPPKS)
     - ✓ Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
     - ✓ Penyediaan Biaya Operasional bagi pengelola dan pelaksana (Kader) ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga / UPPKS)
     - ✓ Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
     - ✓ Advokasi dan Promosi IPK

  b. Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
     - ✓ Promosi dan Sosilisasi program Ketahanan dan Kesejahteraan keluarga bagi mitra Kerja

3. Perbandingan Capaian Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah

Adapun perbandingan antara target dan capaian pada tahun 2022 dengan target jangka menengah pada Renstra DPPKB Kabupaten Luwu Timur 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut Ini :

Tabel. 11
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Jangka Menengah (2021 – 2026)

Sasaran 2 :	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Keluarga			Target Akhir Renstra 2026	% Capaian s/d 2022 terhadap target akhir Renstra 2026
Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi				
	Tahun 2021	Tahun 2022	rata-rata realisasi sampai dengan tahun 2022		
Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	53,07	53,07	53,07	36,33	87%

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Tabel 3.4
Perbandingan Capaian Kinerja DPPKB Kab. Luwu Timur Tahun 2022 dengan target BKKBN Provinsi dan target BKKBN Nasional Menurut PK 2022.

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Capaian Kinerja DPPKB kab.Luwu Timur Tahun 2022		Target Renstra BKKBN Provinsi SulSel 2020-2024	Target Renstra BKKBN Nasional 2020-2024
			Target	Realisasi	2022	2022
1.	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	%	35.05	53.07	53,92	54,00
2.	Median Usia Kawin Pertama Perempuan	Tahun	20	20	21,50	20,71

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Capaian Kinerja DPPKB kab.Luwu Timur Tahun 2022		Target Renstra BKKBN Provinsi SulSel 2020-2024	Target Renstra BKKBN Nasional 2020-2024
			Target	Realisasi	2022	2022
	(**MUKP**) seluruh wanita umur 25-49 tahun					

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta laternatve solusi yang telah dilakukan

Beberapa hal yang perlu mendapat dukungan secara terus menerus adalah :

- ❖ Persentase Akseptor terhadap PUS, kendala yang biasa ditemukan antara lain :
  - Adanya PUS yang belum memiliki anak
  - PUS yang berhenti ber KB karena ingin anak lagi
  - Adanya sebagian PUS yang merasa tidak cocok dengan alat kontrasepsi sehingga lebih memilih untuk tidak ber KB
  - Keterbatasan penyediaan alat kontrasepsi yang selama ini hanya menunggu drop dari pusat
  - Beberapa efek samping penggunaan alat dan obat kontrasepsi, bahkan kejadian kehamilan pada akseptor mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap efektifitas penggunaan alat dan obat kontrasepsi utamanya pada penggunaan alat dan obat kontrasepsi Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP).
- ❖ Pembinaan dan pendampingan kelompok kegiatan (Tribina, UPPKS), beberapa kendala yang ditemukan antara lain :
  - Petugas Pembina kelompok kegiatan (Poktan) dalam hal ini PLKB, PKB, PPKBD, Sub PPKBD dan Kader kelompok kegiatan yang terkait masih ada yang belum terampil.

✓ **Upaya Pemecahan Masalah**

- Melakukan pelayanan KB secara menyeluruh mulai dari daerah perkotaan, daerah tertinggal, terpencil dan perbatasan dengan tetap mematuhi prokoler Kesehatan.
- Meningkatkan intensitas Pembina oleh tenaga lini lapangan (PKB,PLKB, PPKBD, Sub PPKBD dan kader kelompok kegiatan).
- Peningkatan keterampilan bagi tenaga lini lapangan (PKB,PLKB, PPKBD, Sub PPKBD dan kader kelompok kegiata

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Anggaran yang ditetapkan pada APBD sebagai pendukung pencapaian sasaran Strategis II yang terdiri dari 1 Program Ini dengan pagu anggaran sebesar **Rp 2.208.829.000**,- dengan realisasi anggaran sampai triwulan II sebesar **Rp 353.715.330**,- sehingga capaian anggaran yang diperoleh sebesar **39,62%.** Sedangkan realisasi kinerja yang diperoleh adalah sebesar **0%.**

Tabel. 8
Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Meningkatnya Kualitas Pembangunan Keluarga	*Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)*	36,02			2.208.829.000	353.715.330	38,62%

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang kebersihan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pendukung *Indikator kinerja Meningkatnya Kualitas Pembangunan Keluarga, dengan indikator : Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)*

- **Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)**

Target dan realisasi program tahun 2021,2022 dan 2023 dapat digambarkan dengan tabel sebagai berikut :

No	Program dan Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan/Sub kegiatan (Output)	Target 2021	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023
1	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**Rata-rata Usia kawin pertama**	**50,94**	**52,8**	**20 tahun**	**20 tahun**	**20 tahun**	**20 tahun**
2	**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga (persen)**	**71,13**	**72**	**71,18**	**71,73**	**71,18**	**71,73**
	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kelompok BKB, BKL, BKR, PIK Remaja, UPPKS yang ikut orientasi/pelatihan (kelompok)	50	50	60	60	60	60
	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah Kelompok yang terbentuk (kelompok)	5	5	6	6	6	6

	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kelompok BKB, BKL, BKR, PIK Remaja, UPPKS yang ikut promosi dan sosialisasi (kelompok)	25	25	26	26	26

Dari tabel diatas dapat dilihat target tahun 2023 yaitu **20 tahun** dengan realisasi **20 Tahun** menjelaskan bahwa program pendukung dalam dalam meningkatkan indeks pembangunan keluarga (ibangga) mengalami peningkatan dari tahun sebelumya, dalam menjalankan program tersebut didukung oleh kegiatan kegiatan dalam yang dapat meningkatkan perkembangan pembangunan keluarga dilingkup masyarakat.

5.Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.

program/kegiatan apa saja di tahun 2023 yang memberikan kontribusi terhadap keberhasilan Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Untuk Tahun 2023, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana memperoleh anggaran sebesar Rp. **10,047,516,878.00**,- dimana 49% anggaran atau sebesar Rp. 4.920.886.878,- berasal dari dana APBD murni dan APBD Perubahan, dan sisanya 51 % atau sebesar Rp. 5.126.630.000,- berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK), yang terbagi dalam 4 Program, 15 Kegiatan dan 48 Sub Kegiatan. Hasil realisasi sampai dengan triwulan IV, total rata-rata Capaian Kinerja dari seluruh program 1 s.d. program 4 (Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Pengendalian Penduduk, Program Pembinaan Keluarga Berencana/KB, dan Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera/KS) sebesar 90,42% dengan kriteria penilaian realisasi kinerja Sangat Tinggi (ST). Rata-rata Capaian Anggaran dari seluruh program 1 s.d. program 4 adalah 99,93% dengan kriteria penilaian realisasi kinerja Sangat Tinggi (ST) dengan

demikian dapat disimpulkan bahwa seluruh program dan kegiatan yang ada pada tahun 2023 menunjang keberhasilan pencapaian kinerja DPPKB Kab. Luwu Timur

SASARAN 3 (SASARAN PENDUKUNG)

Analisis dan evaluasi capaian kinerja Sasaran Pendukung ***"Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah"*** tahun 2023 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Timur dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel. 19

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Pendukung

Sasaran Pendukung :	**Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah**			**Notifikasi**
Indikator Kinerja Sasaran	**Triwulan II Tahun 2023**			
	Target	Realisasi	Capaian	
Persentase Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	50%	50%	🟢

Keterangan : 🟢 Mencapai/Melampui Target ; 🔴 Belum Mencapai Target

1. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2023

❖ **Analisis Capaian kinerja sasaran sebagai berikut :**

Indikator kinerja sasaran penunjang adalah Persentase Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan **formulasi indikator** yang digunakan untuk menghitung capaian target adalah ***"Jumlah capaian kinerja program dibagi target sasaran dikali seratus".***

Target Indikator sasaran penunjang Tahun 2023 adalah 100% dan realisasi sampai dengan triwulan II 50% dengan persentase capaian kinerja 50%. Persentase capaian mencapai target. Hal inilah yang mempengaruhi realisasi kinerja secara keseluruhan.

Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung sasaran ini adalah sebagai berikut :

- Program Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota
  1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
     - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daeraht
     - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
     - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
     - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
     - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
     - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
  3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
     - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
  4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
     - Pendataan dan pengelolaan Administrasi kepegawaian
     - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
  5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
     - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
     - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
     - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
     - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
     - Fasilitasi Kunjungan Tamu
     - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
   - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
   - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
   - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
   - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

❖ **Hambatan/Kendala**

Dalam pencapaian sasaran tersebut, terdapat beberapa hambatan atau kendala yang dihadapi yaitu :

- Keterlambatan proses pengadaan barang dan jasa
- Terdapat jabatan fungsional penyetaraan dan jabatan kepala dinas yang masih kosong, mempengaruhi realisasi belanja gaji dan tunjangan
- Terdapat sub kegiatan yang sifatnya disediakan, yang penggunaan anggarannya disesuaikan dengan kebutuhan
- Keterlambatan proses administrasi keuangan
- Keterbatasan personil pengelola kegiatan/sub kegiatan

❖ **Solusi**

Untuk menjawab permasalahan atau kendala yang dihadapi maka langkah-langkah yang ditempuh adalah :

- Melakukan koordinasi pejabat pengadaan dan PPK terkait percepatan proses pengadaan barang dan jasa
- Mencermati rekening belanja untuk sub kegiatan yang sifatnya disediakan
- Percepatan proses administrasi keuangan
- Melakukan perhitungan kebutuhan gaji dan tunjangan pada perubahan anggaran

- Percepatan administrasi pertanggungjawaban keuangan
- Mencermati sub kegiatan yang sifatnya disediakan untuk mengantisipasi SILPA akhir tahun
- Melakukan persuratan ke BKPSDM terkait kebutuhan pegawai

❖ **Efisiensi Anggaran**

Dalam pencapaian sasaran pendukung DPPKB, dilakukan beberapa efisiensi angggaran yaitu :

- Efisiensi anggaran pada belanja modal pengadaan peralatan dan mesin lainnya dengan memaksimalkan peralatan yang ada.
- Efisiensi belanja listrik, telepon dan air kantor yaitu, untuk biaya WIFI Kantor, difasilitasi oleh Dinas KOMINFO

❖ **Efisiensi Sumber Daya**

- Terdapat jabatan pelaksana yang masih kosong pada lingkup sekretariat, dan untuk mengakomodir semua pelaksanaan tugas, dilakukan rangkap jabatan sebagai pelaksana harian dan memaksimalkan upah jasa dalam membantu pelaksanaan tugas ASN.
- Memaksimalkan peralatan yang ada dengan melakukan pemeliharaan peralatan kantor untuk mendukung pelaksanaan tugas ASN.

❖ **Analisis Efisiensi Sumber Daya**

Tabel. 20

Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Sasaran Pendukung	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi s.d TW II	Capaian (%)	Alokasi	Realisasi s.d TW II	Capaian (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah	Persentase Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	50%	50%	3.064.238.275,-	1.633.231.802,-	69.34%
Program Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100%	50%	50%	3.064.238.275,-	1.633.231.802,-	69.34%

Tabel. 21

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Pendukung	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	% Tingkat Efisiensi Biaya
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah	Persentase Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	50%	69,34%	1,15%

Pencapaian sasaran pendukung Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah sebesar 100% dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 98,85%, sehingga persentase

efisiensi biaya adalah 1,15%. Adapun Persentase efisiensi biaya dapat hitung dengan menggunakan rumus :

$$\text{Persentase efisiensi biaya} = 100\% - \left[\frac{\text{Realisasi Biaya}}{\text{Target Biaya}} \times 100\% \right]$$

2. Perbandingan antara target dan realisasi dengan tahun sebelumnya

Adapun perbandingan antara target dan realisasi dengan tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel. 22

Perbandingan Target dan Realisasi dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Sasaran Pendukung	Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah									Target Tahun 2026
Indikator Kinerja Sasaran	Tahun 2021			Tahun 2021			Tahun 2023			
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Persentase Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100	100	100	100	100	100	50	50	100%

❖ **Analisis Capaian kinerja sasaran sebagai berikut :**

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat dilihat perbandingan capaian kinerja tahun 2023 mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu :

1. Terdapat harga satuan sesuai dengan SBM untuk 1 unit peralatan, tetapi dapat membiayai lebih dari beberapa unit peralatan misalnya pada sub kegiatan pemelihraan peralatan dan mesin lainnya.
2. Pada sub kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan, banyak diklat/pelatihan yang diikuti tetapi pembiayaannya ditanggung oleh pihak penyelenggara
3. Beberapa kegiatan seperti Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dan beberapa kegiatan lainnya tercapai sesuai target

Namun terdapat pula kendala dalam pencapaian target kinerja tahun 2023 yaitu

a. Keterlambatan proses pengadaan barang dan jasa karena terkendala harga di e-catalog yang lebih tinggi dari harga toko sehingga metode pembeliaannya dilakukan melalui mbizmarket.
b. Keterlambatan PPTK dalam merampungkan administrasi keuangan (SPJ).

3. Perbandingan Capaian Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah

Tabel. 23

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Jangka Menengah

(2021 - 2026)

Sasaran Pendukung :	Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah			Target Akhir Renstra 2026	% Capaian s/d 2021 terhadap target akhir Renstra 2026
Indikator Kinerja Sasaran	**Realisasi**				
	Tahun 2021	Tahun 2022	rata-rata realisasi sampai dengan tahun 2022		
Persentase Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	100%	100%

Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pendukung

Tabel. 24

Capaian Indikator Kinerja Program Pendukung

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	% Capaian
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
I.	Program Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Terciptanya sistem pelayanan administrasi perkantoran yang memadai	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95%	106,5%	112,11%
1.	Kegiatan Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun tepat waktu	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu	100%	100%	100%
a.	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Tersedianya dokumen perencanaan perangkat	Jumlah dokumen perencanaan	2 Dok	2 Dok	100%

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	% Capaian
	Perangkat Daerah	daerah yang disusun tepat waktu	yang disusun tepat waktu			
b.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya dokumen RKA-SKPD yang disusun tepat waktu	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun tepat waktu	2 Dok	2 Dok	100%
c.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya dokumen DPA-SKPD yang disusun tepat waktu	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun tepat waktu	2 Dok	2 Dok	100%
d.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya laporan kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	Jumlah laporan kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	10 Dok	10 Dok	100%
2.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya laporan keuangan perangkat daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tepat Waktu	100%	93,33%	93,33%
a.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya	15 Org	13 Org	86,67%
b.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD n	Tersusunnya laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran dan akhir tahun dengan baik	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu	18 Dok	18 Dok	100%
3.	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi dan penatausahaan Barang Milik Daerah pada perangkat daerah	Persentase BMD yang diadministrasi sesuai standar	100%	100%	100%
a.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah laporan penatausahaan BMD SKPD yang disusun tepat waktu	4 Dok	4 Dok	100%
4.	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase Pegawai Perangkat Daerah yang dilayani	100%	100%	100%
a.	Pendataan dan Pengolahan	Terlaksananya pendataan dan	Jumlah laporan data	8 Dok	8 Dok	100%

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	% Capaian
	Administrasi Kepegawaian	pengolahan Administrasi Kepegawaian	administrasi kepegawaian yang dimutakhirkan			
b.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya peningkatan kapasitas bagi aparatur	Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	2 Org	2 Org	100%
5.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	Persentase administrasi umum Perangkat Daerah berjalan sesuai standar	100%	100,4%	100,4%
a.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan untuk bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	8 Jenis	8 Jenis	100%
b.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik untuk kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	20 Jenis	20 Jenis	100%
c.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan untuk kebutuhan kantor	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	3 Jenis	3 Jenis	100%
d.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	60 Expl	60 Expl	100%
e.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terfasilitasinya makanan dan minuman untuk tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi kunjungannya	275 Org	275 Org	100%
f.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	69 Kali	71 Kali	102,90%
7.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa pendukung dan sarana penunjang urusan	Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia	100%	100%	100%

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	% Capaian
		pemerintahan daerah				
a.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Teradministrasinya surat masuk dan surat keluar dengan baik	Jumlah surat masuk dan keluar yang diagenda	400 Surat	543 Surat	135,75%
b.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya rekening bulanan telepon, air dan listrik kantor demi kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah rekening bulanan telepon, air dan listrik kantor yang terbayarkan	36 Rek	36 Rek	100%
c.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa tenaga pelayanan umum kantor untuk penunjang urusan perkantoran	Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang disediakan	2 Org	2 Org	100%
8.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang siap pakai	Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara	100%	113,6%	113,6%
a.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional dengan baik	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	95 Unit	95 Unit	100%
b.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya dengan baik	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	35 Unit	52 Unit	100%
c.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor dan bangunan lainnya dengan baik	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	100%

❖ **Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja Sasaran**

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota

Indikator Program adalah Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar dengan ***formulasi : jumlah capaian kinerja seluruh kegiatan dibagi jumlah seluruh kegiatan dikali seratus***. Target 100% dan realisasi 50% dengan capaian kinerja 50%%, dan menyerap anggaran sebesar 69,34%. Capain kinerja program melebihi target karena terdapat beberapa kegiatan capaian kinerjanya >100%, sehingga berpengaruh terhadap kinerja program. Pencapaian Kinerja Program didukung oleh 7 kegiatan dan 23 sub kegiatan yaitu :

➢ **Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

Indikator kinerja kegiatan adalah Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu, dengan ***Formulasi : Jumlah capaian kinerja seluruh sub kegiatan dibagi jumlah seluruh sub kegiatan dikali seratus***. Target 100% dan realisasi 100%. Target dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun sebanyak 10 dokumen. Pencapaian kinerja kegiatan didukung oleh :

- **Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**

Indikator kinerja sub kegiatan yaitu Jumlah dokumen Perencanaan Yang disusun Tepat Waktu, dengan target s.d triwulan II sebanyak 2 dokumen dan terealisasi 2 dokumen yaitu tersusunnya dokumen Renja Tahun 2024 dan Renja Perubahan tahun 2023 dengan capaian kinerja 100%. Disediakan anggaran sebesar Rp 17.000.000,-. Dengan realisasi keuangan sampai triwulan II sebesar Rp. 4.598.700,- (46,49%).

- **Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD**

  Indikator kinerja sub kegiatan yaitu Jumlah dokumen RKA- SKPD yang disusun tepat waktu, dengan target sebanyak 2 dokumen dan realisasi 1 dokumen (50%) yaitu penyusunan RKA Perubahan 2023 serta RKA Pokok 2024. Disediakan anggaran sebesar Rp 3.000.000,-. Dan realisasi sampai triwulan II sebesar Rp 0,- (0%). Karena masih Proses pengadaan di lewat E-katalog.

- **Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD**

  Indikator kinerja sub kegiatan yaitu Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun tepat waktu, target sebanyak 2 dokumen dan realisasi 2 Dokumen dengan persentase capaian kinerja 100%, terdiri dari dokumen DPA-SKPD Tahun 2023 dan DPA Perubahan Tahun 2023. Disediakan anggaran sebesar Rp 3.000.000, Realisasi keuangan Rp. 1.214.750 (40,49%).

- **Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

  Indikator kinerja sub kegiatan adalah Jumlah laporan kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu, target sebanyak 10 dokumen dan realisasi 10 dokumen dengan persentase capaian kinerja 100%. Dokumen yang disusun yaitu LPPD, LKPJ, Lapkin Tahun 2021, Dokumen Evaluasi Kinerja TW 4 TA. 2021, Dokumen Evaluasi Renja TW I, II &III TA. 2023 dan Evaluasi Kinerja TW I, II & III TA. 2023. Disediakan anggaran sebesar Rp 25.610.000, Realisasi keuangan Rp. 9.373.850 (42,69%).

➢ **Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

Indikator kegiatan adalah persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik, dengan ***Formulasi : Jumlah capaian***

kinerja seluruh sub kegiatan dibagi jumlah seluruh sub kegiatan dikali seratus. Target 100% dan realisasi 89,47% dengan persentase capaian kinerja 89,74%. Capaian kinerja yang tidak sesuai target karena dari 2 sub kegiatan yang dilaksanakan, salah satu sub kegiatan yaitu Penyediaan Gaji dan Tunjangan realisasinya hanya 78,95%, yang diakibatkan adanya beberapa jabatan struktural eselon III dan IV yang belum terisi personil serta mutasi staf. Pencapaian kinerja kegiatan didukung oleh :

- **Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**

  Indikator kinerja sub kegiatan adalah Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan terbayarkan, target 19 org dan realisasi 19 org dengan persentase capaian kinerja 50 %. Dilakukan perubahan target kinerja pada saat perubahan anggaran yaitu dari 19 org menjadi 18 org. Disediakan anggaran sebesar Rp 2.182.358.875,-. Realisasi keuangan sebesar Rp 1.248.378.556,- atau (71,50%)., terdapat penambahan ASN pada DPPKB Kab. Luwu Timur.

- **Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD**

  Indikator kinerja sub kegiatan adalah Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD yang disusun Tepat Waktu, dengan target 18 dokumen dan realisasi 18 dokumen dengan persentase capaian kinerja 100%. Dokumen yang disusun yaitu Laporan Keuangan Tahun 2023 sebanyak 1 dok, Laporan Triwulan I, II, III &IV sebanyak 4 dok, Laporan Bulanan Bendahara 12 dok dan laporan semester I & II sebanyak 2 dokumen. Disediakan anggaran sebesar Rp 29.360.000,- Realisasi keuangan sebesar Rp 11.700.000,- atau (76,42%).

➢ **Kegiatan Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**

Indikator kinerja kegiatan adalah persentase BMD yang diadministrasikan sesuai standar dengan ***Formulasi : Jumlah capaian kinerja seluruh sub kegiatan dibagi jumlah seluruh sub kegiatan dikali seratus.*** Target 100% dan realisasi 100%. Pencapaian kinerja kegiatan didukung oleh :

- **Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD**

  Indikator kinerja sub kegiatan adalah Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD yang disusun, dengan target sebanyak 4 dokumen dan realisasi 4 dokumen (100%). Dokumen yang disusun adalah Laporan penatausahaan BMD sebanyak 4 dokumen (TW I s.d TW IV). Disediakan anggaran sebesar Rp 16.290.000,- Realisasi keuangan Rp 5.737.850,- (68,52%).

➢ **Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

Indikator kinerja kegiatan adalah Persentase Rata-rata Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan ***Formulasi : Jumlah capaian kinerja seluruh sub kegiatan dibagi jumlah seluruh sub kegiatan dikali seratus.*** Target 100% dan realisasi 166,67% dengan persentase capaian kinerja 166,67%. Capaian kinerja melebihi target karena pada triwulan III dan IV, terdapat beberapa bimtek atau diklat yang dilaksanakan oleh OPD lain yang diikuti oleh personil DPPKB dan pembiayaannya ditanggung oleh penyelenggara kegiatan. Pencapaian kinerja kegiatan didukung oleh :

- **Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan**
- **Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan**

Indikator kinerja sub kegiatan adalah Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan, dengan target Tahun 2023 sebanyak 15 org dan realisasi 25 orang dengan persentase capaian kinerja 166,67%. Adapun bimtek/diklat yang diikuti yaitu Bimtek SKP 1 org, Bimtek SAKIP 2 org, Bimtek LKPJ & LPPD 1 org, Bimtek Pengelolaan Keuangan TAPD, Kepala OPD & Banggar 1 org, Bimtek SKPD 2 org. Disediakan anggaran kas s.d triwulan IV sebesar Rp 55.780.000, teridiri dari belanja kontribusi Rp 30.000.000, dan belanja perjalanan dinas Rp 25.780.000. Dengan realisasi keuangan sebesar Rp 43.583.850,- atau 95,69%.

- **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**

Indikator kinerja kegiatan adalah Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum Perangkat Daerah, dengan ***Formulasi : Jumlah capaian kinerja seluruh sub kegiatan dibagi jumlah seluruh sub kegiatan dikali seratus***. Target 100% dan realisasi 100,4% dengan persentase capaian kinerja 100,4%. Capaian kinerja melebihi dari target karena dari 6 sub kegiatan yang dilaksanakan, salah satu sub kegiatan yaitu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, capaian >100%, dan capaian tersebut mempengaruhi capaian kinerja kegiatan secara keseluruhan. Pencapaian kinerja kegiatan didukung oleh :

- **Sub Kegiatan Penyediaaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor**

Indikator kinerja sub kegiatan adalah Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang di sediakan, target 8 jenis, dan terealisasi 8 jenis (100%). Adapun komponen alat listrik yang disediakan yaitu Kabel Listrik, Lampu LED, Conector/Adaptor, Isolasi, Pitting, Kabel SR, Terminal, Steker, Lampu Sorot. Kebutuhan alat listrik disesuaikan dengan

kebutuhan kantor. Disediakan anggaran sebesar Rp 3.256.550,- dengan realisasi keuangan Rp 3.256.500,- atau 100%..

- **Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor**

Indikator kinerja sub kegiatan adalah Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan, target 20 jenis dan realisasi 20 jenis (100%) terdiri dari BBM operasional 1 jenis, Oli Pelumas 2 jenis dan 17 jenis alat dan bahan kebersihan yaitu Tissu, Harpic (pembersih kmr mandi), Super pel (pembersih lantai), Stella (pengharum ruangan), Sabun Cair, Alat pel, sapu, sikat kamar mandi, sapu lidi bergagang, Tempat sampah besar, keranjang sampah, sikat kloset, alat pel, tempah sampah besar dan sedang, pembersih kamar mandi. Disediakan anggaran sebesar Rp 5.841.600, dan terealisasi Rp 5.665.000,- atau 96,98%. Penggunaan anggaran disesuaikan dengan kebutuhan kantor.

- **Sub Kegiatan Penyediaaan Barang Cetakan dan Penggandaan**

Indikator kinerja sub kegiatan adalah Jumlah Barang cetakan dan/atau penggandaan yang disediakan, target 3 jenis setiap triwulan dan realisasi 3 jenis (100%) terdiri dari penggandaan, cetak dan jilid. Disediakan anggaran sebesar Rp 7.500.000, dan realisasi keuangan Rp 7.488.100,- atau 99,84%.

- **Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan**

Indikator kinerja sub kegiatan adalah jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan, target tahun 2023

sebanyak 60 exp dan terealisasi 60 ekpl dengan capaian kinerja 100%, terdiri dari Koran lokal 12 expl, Koran Nasional 12 expl dan Koran Regional 36 expl. Disediakan anggaran sebesar Rp 6.120.000,- dan terealisasi Rp 5.520.000,- atau 90,20%.

- **Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu**

Indikator kinerja sub kegiatan adalah Jumlah tamu yang difasilitasi, dengan target pada tahun 2022 sebanyak 275 org dan terealisasi 275 org dengan capaian kinerja 100%. Disediakan anggaran sebesar Rp 11.600.000, dan realisasi keuangan sebesar Rp 11.576.000,- atau 99,79%.

- **Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**

Indikator kinerja sub kegiatan adalah jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti, target tahun 2023 sebanyak 69 kali dan terealisasi 71 kali dengan capaian kinerja 102,9%. Capaian yang melebihi dari target disebabkan terdapat beberapa kegiatan urgen yang perlu dikoordinasikan dengan pihak terkait. Disamping itu beberapa undangan/kegiatan rakor yang pembiayaannya ditanggung oleh pihak penyelenggara sehingga terdapat biaya seperti biaya akomodasi dan transport tidak dibayarkan melalui APBD sehingga anggaran dapat digunakan lebih dari target yang direncanakan. Disediakan anggaran sebesar Rp 452.883.000, dengan realisasi keuangan Rp 452.674.347,- atau 99,95%.

➢ **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Indikator kinerja kegiatan adalah Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah, dengan ***Formulasi : Jumlah capaian kinerja seluruh sub kegiatan dibagi***

jumlah seluruh sub kegiatan dikali seratus. Target 100% dan realisasi 111,91% dengan persentase capaian kinerja 111,91%. Capaian kinerja melebihi dari target karena terdapat 1 sub kegiatan yaitu penyediaan jasa surat menyurat, capaian kinerjanya >100% sehingga berpengaruh terhadap capaian kinerja kegiatan secara keseluruhan. Pencapaian kinerja kegiatan didukung oleh :

- **Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat**

  Indikator kinerja sub kegiatan adalah Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan, target tahun 2022 sebanyak 400 surat dan terealisasi 543 surat dengan persentase capaian kinerja 135,75%. Terdiri dari 354 surat masuk dan 189 surat keluar. Disediakan anggaran sebesar Rp 14.929.991,-. Dan terealisasi Rp 14.929.000,- atau 99,99%.

- **Sub Kegiatan Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**

  Indikator kinerja sub kegiatan adalah jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan, target tahun 2022 sebanyak 36 rekening dan realisasi 36 rekening dengan persentase capaian kinerja 100%. terdiri dari Listrik BPBD 12 rek, Token listrik gudang logistik 2 rek, Air kantor 12 rek, kartu halo 10 rek dengan persentase capaian kinerja 100%. Disediakan anggaran sebesar Rp 56.400.000,- Dan terealisasi Rp 51.584.876,- atau 91,46%. Terdapat sisa anggaran belanja listrik yang cukup besar karena Penggunaan anggaran bersifat Riil Cost.

- **Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**

  Indikator kinerja sub kegiatan adalah jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang dibayarkan, target 2 orang dan

realisasi 2 orang (100%) yaitu terbayarnya honor upah jasa cleaning service dan pejabat pengadaan. Disediakan anggaran s.d triwulan IV sebesar Rp 37.600.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 37.600.000,- atau 100%.

- **Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Indikator kinerja kegiatan adalah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan ***Formulasi : Jumlah capaian kinerja seluruh sub kegiatan dibagi jumlah seluruh sub kegiatan dikali seratus.*** Target 100% dan realisasi 113,6% dengan persentase capaian kinerja 113,6%. Capaian kinerja Kegiatan Pemeliharaan BMD penunjang urusan pemerintahan daerah melebihi target karena dari 3 sub kegiatan pengampuh, terdapat 1 sub kegiatan yaitu Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya capain kinerjanya 148,57%. Hal ini disebabkan karena ketersediaan anggaran bisa untuk membiayai lebih dari target yang direncanakan, faktor yang mempengaruhinya adalah SBM untuk 1 unit peralatan bisa untuk membiayai beberapa peralatan lainnya. Dan pada dasarnya BMD yang dipelihara adalah yang mengalami kerusakan dan memerlukan perbaikan. Pencapaian kinerja kegiatan didukung oleh :

- **Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan**

Indikator kinerja sub kegiatan adalah Jumlah kendaraan operasional atau lapangan yang dipelihara, target 95 unit dan realisasi 95 unit dengan persentase capaian kinerja 92,31%.

Adapun kendaraan dinas yang dipelihara yaitu Motor 90 unit, Mobil Alkon 1 unit, Double Cabin 1 unit, Mobil Akseptor I Unit, Disediakan anggaran sebesar Rp 88.000.000,- Dan terealisasi Rp 87.982.561,- atau 99,91%. Realisasi keuangan lebih besar dari realisasi kinerja karena kondisi beberapa kendaraan dinas roda empat sering mengalami kerusakan, disamping karena umur ekonomisnya yang lebih dari 10 tahun juga mobilititas yang tinggi. Pada dasarnya penggunaan anggaran disesuaikan dengan kondisi kendaraan dinas yang memerlukan pemeliharaan/perbaikan.

- **Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya**

Indikator kinerja sub kegiatan adalah jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara, target tahun 2022 sebanyak 35 unit dan terealisasi 52 unit dengan persentase capaian kinerja 148,57%. Adapun peralatan yang mengalami perbaikan yaitu AC 5 unit, printer 10 unit, PC 7 unit, Laptop 10 unit, chainsaw 4 unit (11 kali perbaikan), Mesin babat 1 unit. Capaian yang melebihi target karena besaran anggaran yang disediakan untuk setiap unit peralatan sesuai dengan SBM, cukup untuk membiayai lebih dari 1 unit peralatan. Disediakan anggaran sebesar Rp 6.880.000,- Realisasi keuangan sebesar Rp 6.832.000,- atau 99,30%. Pada dasarnya penggunaan anggaran pemeliharaan disesuaikan dengan kondisi peralatan yang memerlukan perbaikan.

- **Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya**

Indikator kinerja sub kegiatan adalah jumlah gedung kantor dan/atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi, target 2 unit dan realisasi 2 unit (100%). Adapun pekerjaan yang dilakukan adalah Disediakan anggaran sebesar Rp 10.000.000,- dan realisasi Rp 10.000.000,- atau 100%.

1. REALISASI ANGGARAN

Tabel 3.2
Realisasi Anggaran sampai dengan Triwulan II Tahun 2023
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Timur

2. LAPORAN KINERJA PENCAPAIAN SASARAN KINERJA INSTANSI

Tabel 3.3

Pencapaian Sasaran Kinerja Instansi Triwulan II Tahun 2023

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Timur

3. UPAYA PERBAIKAN KINERJA INSTANSI

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tetang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Aparat Pengawas Internal Pemerintah (PIP) melakukan evaluasi atas implementasi Kinerja Pemerintah Daerah sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kewenangannya secara berkala (triwulan) dan tahunan untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Dari hasil evaluasi pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana memperoleh nilai Triwulan II Tahun 2022 yaitu **63,80**. Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja dengan rincian sebagai berikut :

No.	Komponen	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi		
			Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
1	Perencanaan Kiner	30%	21,00	22,20	22,20
2	Pengukuran Kinerj	30%	21,30	21,30	21,30
3	Pelaporan Kinerja	15%	8,25	8,25	8,25
4	Evaluasi Kinerja	25%	13,25	13,25	14,50
	Rata-Rata	100%	63,80	65,00	66,25

Dengan predikat B (Baik) dan Interpretasi hasil evaluasi terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 Unit Kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja.

3. Rekomendasi Perbaikan

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Laporan Kinerja (LKJ) triwulan III dan IV pada LHP Nomor: 700/032/II/ITKAB tanggal 20 februari 2023, perbaikan yang direkomendasika antara lain:

1. Menjadikan pengukuran kinerja sebagai dasar dalam pemberian Reward dan Punishment serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien;

   Upaya perbaikan: telah dilakukan pengukuran kinerja yang dituangkan dalm perjanjian kinerja dan rencana kinerja tahunan
2. Dokumen Laporan Kinerja telah tersedia, namun belum memenuhi standar yang menggambarkan kualitas atas perencanaan kinerja.
   a. Belum menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan
   b. Belum menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah

c. Belum menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya
d. Dan belum menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan kinerja level nasional/international (bendcmark kinerja)

Upaya perbaikan: telah dilakukan monitoring dilapangan dan evaluasi kinerja pertriwulan.

3. Meningkatkan implementasi SAKIP dengan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja internal secara berkualitas sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi kinerja.
   Upaya perbaikan: telah dilakukan Upaya perbaikan sesuai rekomendasi
4. Dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana tidak menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi laporan kinerja triwulan II
   Upaya perbaikan: akan ditindaklajuti sesuai rekomendasi yang diberikan.

BAB 4 PENUTUP

1. KESIMPULAN

Laporan monitoring dan evaluasi Triwulan II yang tersusun ini merupakan media pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Timur. Dengan tersusunnya laporan ini diharapkan dapat menjadi dasar pengambilan keputusan pihak-pihak terkait dalam melakukan introspeksi dan refleksi untuk membuat langkah-langkah perbaikan di masa-masa mendatang.

Hasil kinerja yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Timur dapat di lihat secara keseluruhan capaian kegiatan dari 12 program kegiatan yang di laksanakan realisasi secara keseluruhan untuk capaian realisasi Fisik kegiatan mencapai 39,11% dan untuk realisasi Fisik keuangan mencapai 28,88%.

Laporan ini juga dapat dijadikan sebagai dasar penyusunan LAKIP Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Timur tahun 2023, termasuk evaluasi dan analisis terhadap kinerja pencapaian sasaran dan kegiatan selama tahun 2023. Di samping dikemukakan gambaran kinerja, juga dilaporkan analisis kinerja yang menggambarkan keberhasilan dan kegagalan masing-masing sasaran serta permasalahan yang dihadapi sebagai faktor penghambat keberhasilan.

2. SARAN

Dari berberapa permasalahan yang dihadapi selama Triwulan II tahun 2023 terdapat beberapa saran yang diberikan, antara lain:

- Tetap berpedoman pada rencana aksi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan agar target dapat tercapai sesuai rencana;
- Pelaksanaan kegiatan agar dilaksanakan diawal triwulan berjalan;
- Melakukan percepatan realisasi anggaran sesuai dengan target yang telah direncanakan sesaui anggaran kas;
- Membuat pertanggungjawaban keuangan pada kegiatan yang telah dilaksanakan;
- Perlunya koordinasi yang intensif antara pengelola kinerja dari level paling atas hingga ke bawah untuk mengurangi kesalahan dalam melakukan pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan;
- Perlu adanya penguatan sistem perencanaan serta pengendalian kinerja dan anggaran untuk memastikan kelancaran pelaksanaan kegiatan sehingga target dapat tercapai.

Malili, Juli 2023
KEPALA DINAS,

Dra. Hj. Puspawati
NIP. 19670308 199402 2 002

LAPORAN KEMAJUAN KEGIATAN
Tahun Anggaran 2023
TRIWULAN II
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Pagu (Rp)		Target s.d Tw II		Realisasi				Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Fisik (%)	Keuangan (Rp)	Fisik (%)	Fisik TTB (%)	Keuangan			
								Rp	%		
2.14.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**3,064,238,275.00**	**3,433,414,732.00**	50.00%	2,354,222,495.00	53.22%		1,633,231,802.00	53.30%		
2.14.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**48,610,000.00**	**56,620,000.00**	50.00%	35,157,000.00	31.24%		15,187,300.00	31.24%		
2.14.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	17,000,000.00	25,010,000.00	50.00%	8,500,000.00	27.05%	0.04%	4,598,700.00	27.05%	Prosedur SPJ yang Rumit	Berkoordinasi dengan pejabat pengadaan terkait proses SPJ
2.14.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3,000,000.00	3,000,000.00	50.00%	1,700,000.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	Prosedur SPJ yang Rumit	
2.14.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3,000,000.00	3,000,000.00	50.00%	3,000,000.00	40.49%	0.01%	1,214,750.00	40.49%	Tidak Ada	
2.14.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25,610,000.00	25,610,000.00	50.00%	21,957,000.00	36.60%	0.09%	9,373,850.00	36.60%	Prosedur SPJ yang Rumit	
2.14.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**2,211,718,875.00**	**2,353,380,837.00**	50.00%	1,761,197,095.00	56.97%		1,260,078,556.00	56.97%		
2.14.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,182,358,875.00	2,321,620,837.00	50.00%	1,745,887,095.00	57.20%	11.79%	1,248,378,556.00	57.20%	Tidak Ada	
2.14.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	29,360,000.00	31,760,000.00	50.00%	15,310,000.00	39.85%	0.11%	11,700,000.00	39.85%	Tidak Ada	
2.14.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**16,290,000.00**	**16,290,000.00**	50.00%	8,145,000.00	35.22%		5,737,850.00	35.22%		
2.14.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	16,290,000.00	16,290,000.00	50.00%	8,145,000.00	35.22%	0.05%	5,737,850.00	35.22%	Tidak Ada	
2.14.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**84,270,000.00**	**62,930,000.00**	50.00%	76,902,000.00	5.93%		5,000,000.00	5.93%		
2.14.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	25,000,000.00	22,270,000.00	50.00%	17,632,000.00	20.00%	0.05%	5,000,000.00	20.00%	Tidak Ada	
2.14.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	59,270,000.00	40,660,000.00	50.00%	59,270,000.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	Tidak Ada	
2.14.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**447,270,400.00**	**605,723,400.00**	50.00%	296,160,400.00	49.87%		223,056,435.00	49.87%		
2.14.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3,250,000.00	3,250,000.00	50.00%	2,000,000.00	49.90%	0.02%	1,621,600.00	49.90%	Tidak Ada	
2.14.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5,800,000.00	5,800,000.00	50.00%	3,300,000.00	44.47%	0.02%	2,579,500.00	44.47%	Tidak Ada	
2.14.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7,500,000.00	7,500,000.00	50.00%	3,750,000.00	15.49%	0.01%	1,162,000.00	15.49%	Tidak Ada	
2.14.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6,120,000.00	6,120,000.00	50.00%	3,060,000.00	32.68%	0.02%	2,000,000.00	32.68%	Tidak Ada	
2.14.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	9,100,000.00	19,600,000.00	50.00%	4,550,000.00	47.08%	0.04%	4,284,000.00	47.08%	Tidak Ada	
2.14.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	415,500,400.00	563,453,400.00	50.00%	279,500,400.00	50.88%	2.00%	211,409,335.00	50.88%	Tidak Ada	
2.14.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**106,199,000.00**	**110,670,495.00**	50.00%	59,501,000.00	44.49%		49,481,135.00	46.59%		
2.14.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	14,999,000.00	14,999,000.00	50.00%	9,101,000.00	39.34%	0.06%	5,900,000.00	39.34%	Tidak Ada	
2.14.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	50,400,000.00	54,871,495.00	50.00%	30,000,000.00	39.34%	0.19%	26,581,135.00	52.74%	Tidak Ada	
2.14.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	40,800,000.00	40,800,000.00	50.00%	20,400,000.00	52.74%	0.20%	17,000,000.00	41.67%	Tidak Ada	
2.14.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**149,880,000.00**	**227,800,000.00**	50.00%	117,160,000.00	49.83%		74,690,526.00	49.83%		

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Pagu (Rp)		Target s.d Tw II		Realisasi				Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Fisik (%)	Keuangan (Rp)	Fisik (%)	Fisik TTB (%)	Keuangan			
								Rp	%		
2.14.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	88,000,000.00	148,000,000.00	50.00%	58,000,000.00	64.95%	0.54%	57,158,526.00	64.95%	Tidak Ada	
2.14.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6,880,000.00	9,800,000.00	50.00%	4,160,000.00	41.42%	0.03%	2,850,000.00	41.42%	Tidak Ada	
2.14.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	55,000,000.00	70,000,000.00	50.00%	55,000,000.00	26.69%	0.14%	14,682,000.00	26.69%	Tidak Ada	
2.14.02	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**389,353,050.00**	**380,848,050.00**	50.00%	211,774,226.00	25.07%		97,607,195.00	25.07%		
2.14.02.2.01	**Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**	**74,940,600.00**	**66,435,600.00**	50.00%	54,568,000.00	57.19%		42,857,000.00	57.19%		
2.14.02.2.01.10	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	22,890,600.00	22,890,600.00	50.00%	8,338,000.00	17.40%	0.04%	3,982,000.00	17.40%	Tidak Ada	
2.14.02.2.01.13	Sosialisasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan Kepada Pemangku Kepentingan	26,700,000.00	19,115,000.00	50.00%	20,880,000.00	54.10%	0.14%	14,445,000.00	54.10%	Tidak Ada	
2.14.02.2.01.15	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	25,350,000.00	24,430,000.00	50.00%	25,350,000.00	96.37%	0.23%	24,430,000.00	96.37%	Tidak Ada	
2.14.02.2.02	**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**314,412,450.00**	**314,412,450.00**	50.00%	157,206,226.00	17.41%		54,750,195.00	17.41%		
2.14.02.2.02.11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	178,212,450.00	178,212,450.00	50.00%	89,106,226.00	8.24%	0.14%	14,679,800.00	8.24%	Tidak Ada	
2.14.02.2.02.13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	136,200,000.00	136,200,000.00	50.00%	68,100,000.00	29.42%	0.38%	40,070,395.00	29.42%	Tidak Ada	
2.14.03	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**4,929,143,100.00**	**4,639,401,100.00**	50.00%	2,044,931,100.00	19.77%		974,287,740.00	19.77%		
2.14.03.2.01	**Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal**	**1,213,687,000.00**	**1,222,410,000.00**	50.00%	615,624,500.00	22.58%		274,077,405.00	22.58%		
2.14.03.2.01.01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	95,045,000.00	95,045,000.00	50.00%	55,045,000.00	37.23%	0.33%	35,390,000.00	37.23%	Tidak Ada	
2.14.03.2.01.02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	37,575,000.00	38,495,000.00	50.00%	18,787,500.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	Tidak Ada	
2.14.03.2.01.04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	150,000,000.00	150,000,000.00	50.00%	100,000,000.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	Tidak Ada	
2.14.03.2.01.06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	203,457,000.00	203,457,000.00	50.00%	103,217,000.00	24.27%	0.47%	49,379,305.00	24.27%	Tidak Ada	
2.14.03.2.01.07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	636,700,000.00	636,700,000.00	50.00%	291,625,000.00	28.52%	1.71%	181,608,100.00	28.52%	Tidak Ada	
2.14.03.2.01.08	Pengendalian Program KKBPK	90,910,000.00	98,713,000.00	50.00%	46,950,000.00	8.47%	0.07%	7,700,000.00	8.47%	Tidak Ada	

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Pagu (Rp)		Target s.d Tw II		Realisasi				Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Fisik (%)	Keuangan (Rp)	Fisik (%)	Fisik TTB (%)	Keuangan			
								Rp	%		
2.14.03.2.02	**Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**	**1,493,689,000.00**	**1,499,484,000.00**	50.00%	746,844,500.00	27.14%		405,403,550.00	27.14%		
2.14.03.2.02.03	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	126,102,000.00	131,897,000.00	50.00%	63,051,000.00	46.87%	0.56%	59,101,900.00	46.87%	Tidak Ada	
2.14.03.2.02.04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	1,367,587,000.00	1,367,587,000.00	50.00%	683,793,500.00	25.32%	3.27%	346,301,650.00	25.32%	Tidak Ada	
2.14.03.2.03	**Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**	**1,778,827,100.00**	**1,473,027,100.00**	50.00%	460,992,100.00	13.09%		232,844,285.00	13.09%		
2.14.03.2.03.01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	55,316,000.00	55,316,000.00	50.00%	27,858,500.00	26.05%	0.14%	14,410,750.00	26.05%	Tidak Ada	
2.14.03.2.03.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	776,296,100.00	776,296,100.00	50.00%	433,133,600.00	28.14%	2.06%	218,433,535.00	28.14%	Tidak Ada	
2.14.03.2.03.06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	931,315,000.00	625,515,000.00	50.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	Tidak Ada	
2.14.03.2.03.08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	15,900,000.00	15,900,000.00	50.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	Tidak Ada	
2.14.03.2.04	**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**	**442,940,000.00**	**444,480,000.00**	50.00%	221,470,000.00	13.99%		61,962,500.00	13.99%		
2.14.03.2.04.03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	442,940,000.00	444,480,000.00	50.00%	221,470,000.00	13.99%	0.59%	61,962,500.00	13.99%	Tidak Ada	
2.14.04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**2,208,829,000.00**	**2,153,046,000.00**	50.00%	892,828,100.00	16.01%		353,715,330.00	16.01%		
2.14.04.2.01	**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**2,192,229,000.00**	**2,137,446,000.00**	50.00%	876,228,100.00	15.65%		343,131,330.00	15.65%		
2.14.04.2.01.01	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	19,603,000.00	19,603,000.00	50.00%	19,603,000.00	97.45%	0.18%	19,102,800.00	97.45%	Tidak Ada	

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Pagu (Rp)		Target s.d Tw II		Realisasi				Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Fisik (%)	Keuangan (Rp)	Fisik (%)	Fisik TTB (%)	Keuangan			
								Rp	%		
2.14.04.2.01.02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	360,000,000.00	352,170,000.00	50.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	Tidak Ada	
2.14.04.2.01.03	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	168,142,000.00	131,157,000.00	50.00%	98,941,100.00	34.81%	0.55%	58,526,200.00	34.81%	Tidak Ada	
2.14.04.2.01.05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1,442,700,000.00	1,442,700,000.00	50.00%	611,380,000.00	11.40%	1.55%	164,535,000.00	11.40%	Tidak Ada	
2.14.04.2.01.07	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	184,640,000.00	180,342,000.00	50.00%	129,160,000.00	48.50%	0.85%	89,543,380.00	48.50%	Tidak Ada	
2.14.04.2.01.11	Advokasi dan Promosi IPK	17,144,000.00	11,474,000.00	50.00%	17,144,000.00	66.64%	0.11%	11,423,950.00	66.64%	Tidak Ada	
2.14.04.2.02	**Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**16,600,000.00**	**15,600,000.00**	50.00%	16,600,000.00	63.76%		10,584,000.00	63.76%		
2.14.04.2.02.04	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	16,600,000.00	15,600,000.00	50.00%	16,600,000.00	63.76%	0.10%	10,584,000.00	63.76%	Tidak Ada	
		10,591,563,425	**10,606,709,882**	**50.00%**	**5,503,755,921**		**28.86%**	**3,058,842,067**	**28.88%**		

cc

Evaluasi Hasil Renja Tahun 2023

TRIWULAN II

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan Renja Tahun 2022 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan Renstra Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2023 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan	
										I		II		III		IV												
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Semua Bidang																										
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar (%)	100.00	16,654,138,895	10.00	-	100	3,064,238,275		422,730,191		1,210,501,611		-		-	-	1,633,231,802	0.00%	53.30%	100.00	1,633,231,802		9.81%	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, pengangaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu (%)	200.00	451,811,587	0.00	-	100	48,610,000	25	4,483,450	25	10,703,850		-		-	50	15,187,300	50.00%	31.24%	50.00	15,187,300	25.00%	12.65%			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun (Dokumen)		78,508,091	0.00	-	3	17,000,000	1	848,700	1	3,750,000					2	4,598,700	66.67%	27.05%	2.00	4,598,700	0.00%	5.86%		Prosedur SPJ yang Rumit (Tindak Lanjut : Berkoordinasi dengan pejabat pengadaan terkait proses SPJ)	1034
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun (Dokumen)		47,345,955	0.00	-	2	3,000,000	-	-	-	-					-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%		Prosedur SPJ yang Rumit	1035
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD (Kali)		33,912,665	0.00	-	2	3,000,000	1	1,214,750	-	-					1	1,214,750	50.00%	40.49%	1.00	1,214,750	0.00%	3.58%		Tidak Ada	1036
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan kinerja yang disusun (Dokumen)		292,044,876	0.00	-	8	25,610,000	4	2,420,000	2	6,953,850					6	9,373,850	75.00%	36.60%	6.00	9,373,850	0.00%	3.21%		Prosedur SPJ yang Rumit	1037
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi keuangan perangkat daerah (%)	200.00	12,332,353,180	0.00	-	100	2,211,718,875	25	283,928,613	25	976,149,943		-		-	50	1,260,078,556	50.00%	56.97%	50.00	1,260,078,556	25.00%	16.97%			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Menerima Gaji dan Tunjangan (Orang)		12,157,869,730	0.00	-	19	2,182,358,875	19	283,928,613	19	964,449,943					10	1,248,378,556	50.00%	57.20%	9.50	1,248,378,556	0.00%	10.27%		Tidak Ada	1038
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan persemester (Laporan)		174,483,450	0.00	-	13	29,360,000	4	-	4	11,700,000					8	11,700,000	61.54%	39.85%	8.00	11,700,000	0.00%	6.71%		Tidak Ada	1039
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase dokumen barang milik daerah yang disusun tepat waktu (%)	200.00	105,505,668	0.00	-	100	16,290,000	25	487,850	25	5,250,000		-		-	50	5,737,850	50.00%	35.22%	50.00	5,737,850	25.00%	5.44%			
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)		105,505,668	0.00	-	4	16,290,000	1	487,850	1	5,250,000					2	5,737,850	50.00%	35.22%	2.00	5,737,850	0.00%	5.44%		Tidak Ada	1040
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			289,365,400		-		84,270,000		2,000,000		3,000,000		-		-		5,000,000		5.93%		5,000,000		2.82%			
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	*Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)		177,525,400	0.00	-	8	25,000,000	2	2,000,000	2	3,000,000					4	5,000,000	50.00%	20.00%	4.00	5,000,000	0.00%	2.82%		Tidak Ada	1041
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimtek (Orang)		111,840,000	0.00	-	2	59,270,000	-	-	-	-					-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%		Tidak Ada	1042
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi umum PD (%)	200.00	2,232,671,150	0.00	-	100	447,270,400	25	88,950,080	25	134,106,355		-		-	50	223,056,435	50.00%	49.87%	50.00	223,056,435	25.00%	51.07%			

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan Renja Tahun 2022 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan Renstra Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2023 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (Jenis)		17,066,350	0.00	-	2	3,250,000	-	-	2	1,621,600					1	1,621,600	25.00%	49.90%	0.50	1,621,600	0.00%	9.50%		Tidak Ada	1043
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang Tersedia (Jenis)		30,119,500	0.00	-	203	5,800,000	50	1,290,500	50	1,289,000					100	2,579,500	49.26%	44.47%	100.00	2,579,500	0.00%	8.56%		Tidak Ada	1044
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia (Jenis)		51,799,900	0.00	-	3	7,500,000	3	292,000	3	870,000					2	1,162,000	50.00%	15.49%	1.50	1,162,000	0.00%	2.24%		Tidak Ada	1045
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan (Jenis)		30,660,000	0.00	-	60	6,120,000	10	920,000	20	1,080,000					30	2,000,000	50.00%	32.68%	30.00	2,000,000	0.00%	6.52%		Tidak Ada	1046
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu (Kali)		30,525,000	0.00	-	125	9,100,000	16	764,000	40	3,520,000					56	4,284,000	44.80%	47.08%	56.00	4,284,000	0.00%	14.03%		Tidak Ada	1047
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah yang dilaksanakan (Kali)		2,072,500,400	0.00	-	411	415,500,400	50	85,683,580	100	125,725,755					150	211,409,335	36.50%	50.88%	150.00	211,409,335	0.00%	10.20%		Tidak Ada	1048
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	200.00	561,431,910	0.00	-	100	106,199,000	25	17,850,956	25	31,630,179		-		-	50	49,481,135	50.00%	46.59%	50.00	49,481,135	25.00%	25.58%			
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah layanan Surat Menyurat yang tertangani (Jenis)		78,431,910	0.00	-	400	14,999,000	50	2,470,000	50	3,430,000					100	5,900,000	25.00%	39.34%	100.00	5,900,000	0.00%	7.52%		Tidak Ada	1049
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah layanan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan lainnya yang terpenuhi (Jenis)		295,000,000	0.00	-	3	50,400,000	3	9,380,956	3	17,200,179					2	26,581,135	50.00%	52.74%	1.50	26,581,135	0.00%	9.01%		Tidak Ada	1050
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor (Orang)		188,000,000	0.00	-	3	40,800,000	3	6,000,000	3	11,000,000					2	17,000,000	50.00%	41.67%	1.50	17,000,000	0.00%	9.04%		Tidak Ada	1051
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara (%)	200.00	681,000,000	0.00	-	100	149,880,000	25	25,029,242	25	49,661,284		-		-	50	74,690,526	50.00%	49.83%	50.00	74,690,526	25.00%	25.95%			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan Laik Jalan (Unit)		451,000,000	0.00	-	96	88,000,000	5	21,346,242	45	35,812,284					50	57,158,526	52.08%	64.95%	50.00	57,158,526	0.00%	12.67%		Tidak Ada	1052
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin dalam Kondisi Baik (Unit)		75,000,000	0.00	-	3	6,880,000	3	1,500,000	-	1,350,000					1	2,850,000	25.00%	41.42%	0.75	2,850,000	0.00%	3.80%		Tidak Ada	1053
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dalam kondisi baik (Bangunan)		155,000,000	0.00	-	2	55,000,000	1	2,183,000	2	12,499,000					1	14,682,000	37.50%	26.69%	0.75	14,682,000	0.00%	9.47%		Tidak Ada	1054
																				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		47.18%	53.30%						
																				Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Rendah						
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																											
		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan (OPD) (OPD)	2.01	134,200,000	0.00	-	2.01	389,353,050		9,251,000		88,356,195		-		-	-	97,607,195	0.00%	25.07%	2.02	97,607,195		72.73%		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan Renja Tahun 2022 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan Renstra Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2023 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan	
		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah Kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk) (Dokumen)	4.00	134,200,000	0.00	-	2	74,940,600	-	-	-	42,857,000				-	-	42,857,000	0.00%	57.19%	0.00	42,857,000	0.00%	10.76%			
		Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	*Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Non Formal (Laporan)		-	0.00	-	3	22,890,600	-	-	-	3,982,000				-	-	3,982,000	0.00%	17.40%	0.00	3,982,000	0.00%	0.00%		Tidak Ada	1055
		Sosialisasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan Kepada Pemangku Kepentingan	*Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan (Organisasi)		134,200,000	0.00	-	24	26,700,000	-	-	-	14,445,000				-	-	14,445,000	0.00%	54.10%	0.00	14,445,000	0.00%	10.76%		Tidak Ada	1056
		Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	Jumlah rapat pengendalian program KKBPK (Kali)		-	0.00	-	130	25,350,000	-	-	130	24,430,000				130	24,430,000	100.00%	96.37%	130.00	24,430,000	0.00%	0.00%		Tidak Ada	1057
		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penyediaan data mikro keluarga di setiap desa (Persen)	200.00	-	0.00	-	100	314,412,450	-	9,251,000	-	45,499,195		-	-	-	-	54,750,195	0.00%	17.41%	0.00	54,750,195	0.00%	0.00%			
		Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	*Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya (Dokumen)		-	0.00	-	3	178,212,450	-	2,000,000	-	12,679,800				-	-	14,679,800	0.00%	8.24%	0.00	14,679,800	0.00%	0.00%		Tidak Ada	1058
		Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah kegiatan monitoring, evaluasi, dan pembinaan program Bangga Kencana (Kali)		-	0.00	-	3	136,200,000	-	7,251,000	-	32,819,395				-	-	40,070,395	0.00%	29.42%	0.00	40,070,395	0.00%	0.00%		Tidak Ada	1059
																	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)			6.51%	25.07%						
																	Predikat Kinerja			Sangat Rendah	Sangat Rendah						
		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (modern conraceptive prevalance rate/mCPR) (Persen)	25.96	22,624,509,832	0.00	-	26.76	4,929,143,100		134,821,600		839,466,140				-	-	974,287,740	0.00%	19.77%	28.16	974,287,740		4.31%	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase Masyarakat yang terpapar isi pesan program KKBPK (Advokasi dan KIE) (Persen)	200.00	4,373,624,280	0.00	-	100	1,213,687,000	15	87,992,800	20	186,084,605				-	35	274,077,405	35.00%	22.58%	35.00	274,077,405	17.50%	45.85%			
		Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Peserta Advokasi Program KKBPK (Orang)		123,023,902	0.00	-	40	95,045,000	10	19,300,000	10	16,090,000				-	20	35,390,000	50.00%	37.23%	20.00	35,390,000	0.00%	28.77%		Tidak Ada	1060
		Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Peserta KIE (Orang)		409,900,378	0.00	-	625	37,575,000	-	-	-	-				-	-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%		Tidak Ada	1061
		Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program (Dokumen)		353,200,000	0.00	-	2	150,000,000	-	-	-	-				-	-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%		Tidak Ada	1062

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan Renja Tahun 2022 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan Renstra Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2023 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan	
		Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	*Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) (Laporan)		857,500,000	0.00	-	1056	203,457,000	264	21,800,000	-	27,579,305					264	49,379,305	25.00%	24.27%	264.00	49,379,305	0.00%	5.76%		Tidak Ada	1063
		Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	*Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Laporan)		2,430,000,000	0.00	-	12	636,700,000	12	46,892,800	12	134,715,300					6	181,608,100	50.00%	28.52%	6.00	181,608,100	0.00%	7.47%		Tidak Ada	1064
		Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK (Laporan)		200,000,000	0.00	-	2	90,910,000	-	-	1	7,700,000					1	7,700,000	50.00%	8.47%	1.00	7,700,000	0.00%	3.85%		Tidak Ada	1065
		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah dibidang pengendalian penduduk (Persen)	200.00	9,072,914,400	0.00	-	100	1,493,689,000	100	35,101,900	100	370,301,650		-	-		50	405,403,550	50.00%	27.14%	50.00	405,403,550	25.00%	16.51%			
		Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah PLKB yang dibina (Orang)		473,284,400	0.00	-	100	126,102,000	100	35,101,900	100	24,000,000					50	59,101,900	50.00%	46.87%	50.00	59,101,900	0.00%	12.49%		Tidak Ada	1066
		Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah PPKBD dan Sub PPKBD yang diberdayakan (Orang)		8,599,630,000	0.00	-	581	1,367,587,000	581	-	581	346,301,650					291	346,301,650	50.00%	25.32%	290.50	346,301,650	0.00%	4.03%		Tidak Ada	1067
		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) (Persen)	200.00	9,177,971,152	0.00	-	100	1,778,827,100	100	11,726,900	100	221,117,385		-	-		50	232,844,285	50.00%	13.09%	50.00	232,844,285	25.00%	12.44%			
		Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Fasilitas kesehatan yang tersedia alat kontrasepsi (Faskes)		198,250,000	0.00	-	21	55,316,000	21	5,125,600	21	9,285,150					11	14,410,750	50.00%	26.05%	10.50	14,410,750	0.00%	7.27%		Tidak Ada	1068
		Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Akseptor yang menggunakan kontrasepsi MKJP (Akseptor)		4,223,374,152	0.00	-	11500	776,296,100	9,891	6,601,300	######	211,832,235					5,183	218,433,535	45.07%	28.14%	5182.50	218,433,535	0.00%	5.17%		Tidak Ada	1069
		Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	*Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB (Unit)		4,706,747,000	0.00	-	76	931,315,000	-	-	-	-					-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%		Tidak Ada	1070
		Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Sarana Penunjang KB yang tersedia (Faskes)		49,600,000	0.00	-	21	15,900,000	-	-	-	-					-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%		Tidak Ada	1071

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan Renja Tahun 2022 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan Renstra Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2023 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan	
		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Stakholder/ Pemangku kepentingan dan mitra kerja (Termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK (Jumlah)	46.00	-	0.00	-	100	442,940,000	100	-	100	61,962,500	-	-	-		50	61,962,500	50.00%	13.99%	50.00	61,962,500	108.70%	0.00%			
		Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah pembinaan pokja dan rumah data di kampung KB (Kali)		-	0.00	-	2	442,940,000	-	-	-	61,962,500					-	61,962,500	0.00%	13.99%	0.00	61,962,500	0.00%	0.00%		Tidak Ada	1072
																				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		32.19%	19.77%						
																				Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah						
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Indeks Pembangunan Keluarga (Persen)	20.80	-	0.00	-	21	2,208,829,000		34,484,400		319,230,930		-	-		-	353,715,330	0.00%	16.01%	20.00	353,715,330		0.00%	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga (Persen)	143.40	-	0.00	-	71.18	2,192,229,000	-	34,484,400	-	308,646,930		-	-		-	343,131,330	0.00%	15.65%	0.00	343,131,330	0.00%	0.00%			
		Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah Kelompok BKB, BKR, BKL, PIK R dan UPPKS yang di bentuk (Kelompok)		-	0.00	-	7	19,603,000	7	14,260,000	-	4,842,800					7	19,102,800	100.00%	97.45%	7.00	19,102,800	0.00%	0.00%		Tidak Ada	1073
		Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	*Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (Unit)		-	0.00	-	26	360,000,000	-	-	-	-					-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%		Tidak Ada	1074
		Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kelompok BKB, BKL, BKR, PIK Remaja, UPPKS yang ikut orientasi/pelatihan (Kelompok)		-	0.00	-	60	168,142,000	-	3,690,000	11	54,836,200					11	58,526,200	18.33%	34.81%	11.00	58,526,200	0.00%	0.00%		Tidak Ada	1075
		Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	*Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (Orang)		-	0.00	-	45	1,442,700,000	10	-	24	164,535,000					34	164,535,000	75.56%	11.40%	34.00	164,535,000	0.00%	0.00%		Tidak Ada	1076
		Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kelompok BKB, BKL, BKR, PIK Remaja, UPPKS yang ikut promosi dan sosialisasi (Kelompok)		-	0.00	-	45	184,640,000	10	16,534,400	24	73,008,980					34	89,543,380	75.56%	48.50%	34.00	89,543,380	0.00%	0.00%		Tidak Ada	1077

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan Renja Tahun 2022 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan Renstra Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2023 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan	
		Advokasi dan Promosi IPK	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) (Orang)		-	0.00	-	80	17,144,000	-	-	90	11,423,950					90	11,423,950	112.50%	66.64%	90.00	11,423,950	0.00%	0.00%		Tidak Ada	1078
		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Peran serta organisasi kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/kota dalam pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Persen)	151.03	-	0.00	-	75.01	16,600,000	-	-	-	10,584,000		-		-	-	10,584,000	0.00%	63.76%	0.00	10,584,000	0.00%	0.00%			
		Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Jumlah peserta promosi dan sosialisasi (Orang)		-	0.00	-	60	16,600,000	-	-	60	10,584,000					60	10,584,000	100.00%	63.76%	60.00	10,584,000	0.00%	0.00%		Tidak Ada	1079
																		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		59.57%	16.01%						
																		Predikat Kinerja		Rendah	Sangat Rendah						
								10,591,563,425		**TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM**										**41.29%**	**28.88%**						
										PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM										**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**						

Faktor pendorong keberhasilan pencapaian kinerja :

Faktor penghambat pencapaian kinerja :

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya**):